43667.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM MENUNTASKAN TUNA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

YUDISTIRA

NIM. 500625352

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

Yudistira
yudis1963@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Kata kunci: Implementasi, pendidikan nonformal, buta aksara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, dan untuk mengetahui faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama, sedangkan pemilihan jumlah informan dilakukan secara *purposive sampling* sebanyak 15 orang. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen review. Metode analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, meliputi: kurikulum, tenaga pendidikan dan peserta didik, serta sarana dan prasarana, dan (2) Faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama adalah karakteristik lembaga, kejelasan standar dan tujuan, sumber daya yang diperlukan, komunikasi, kondisi sosial ekonomi, dan kesediaan & komitmen dari pelaksana.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF POLICY OF NON-FORMAL EDUCATION IN THE ERADICATION OF ILLITERACY REGENCY OF TELUK WONDAMA

Yudistira
yudis1963@gmail.com

Post Graduate Program
The Open University

The key word: implementation, policy, non-formal education, illiteracy.

This research aims to know the implementation of the policy of non-formal education in the eradication of illiteracy in the District Rasiey implemented by Workshops Learning Activities Regency of Teluk Wondama, and to find out the determinant factor in the implementation of the policy of eradication of illiteracy in Workshops and Learning Activities Regency of Teluk Wondama. This research using a qualitative approach with descriptive type. The source of the informant in this research was a number of officials and community leader in Regency of Teluk Wondama, while the sampling technique using purposive sampling as many as 15 people. The procedure collection data using observation, interview, and documentation. The method of data analysis was used descriptive analysis. The results of research showed that: (1) The implementation of the policy of non-formal education in the eradication of illiteracy at Rasiey District by Workshop Learning Activities Regency of Teluk Wondama, namely: curriculum, educators and learners, facilities and infrastructure; and (2) The determinant factor in the implementation of the policy of non-formal education in order to complete illiteracy at Workshop Learning Activities Regency of Teluk Wondama, namely: the characteristic of organization, clearness of standard and aims, the sources used, communication, social economic condition, and the willingness and commitment from the activities.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya,Pondok Cabe,Ciputat 15418
Tlp.021 – 7415050.Faks. 021 - 7415588

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Buta Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"
adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditermukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sorong, 22 Desember 2017

Yang Menyatakan

(Yudistira)
NIM. 500625352

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	**YUDISTIRA**
NIM	:	**500625352**
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Buta Aksara diKabupaten Teluk Wondama

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister,(TAPM) Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	:	Senin, 22 Desember 2017
Waktu	:	Pukul 15.00 s/d 16.00

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM	**Tanda Tangan**
Ketua Komisi Penguji Dr. Sri Listyarini,M.Ed	.....
Penguji Ahli Djaka Permana,M.Si,Ph.D.	.....
Pembimbing I Dr. H. Muh. Basri, M.Si	.....
Pembimbing II Dr.Iqbal Miftakhul Mujtahid,S.IP,M.Si	.....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menentukan Buta Aksara di Kabupaten Teluk Wondama
Penyusun TAPM	:	**YUDISTIRA**
NIM	:	**500625352**
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Publik

Menyetujui,

Pembimbing II,	Pembimbing I,
Dr.Iqbal Miftakhul Mujtahid,S.IP,M.Si	**Dr. H. Muh. Basri, M.Si**
NIP. 19820606 2008012 001	**NIP. 19540325 198103 1 003**

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Program Ilmu Administrasi,	Direktur Program Pascasarjana,
Dr. Darmanto,M.Ed	**Dr. Liestyono Bawono Irianto,M.Si**
NIP.19591027 198603 1 003	**NIP. 19581215 198601 1 009**

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Anugerah dan Perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini dengan baik. Tesis yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"* ditulis dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih memiliki kekurangan dan tanpa bantuan dari berbagai pihak, sejak awal perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, maka sangat sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka yang memberikan peluang kepada mahasiswa di seluruh pelosok tanah air yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengakses Pendidikan Tinggi secara regular karena berbagai keterbatasan, sehingga dapat belajar di Universitas Terbuka tanpa meninggalkan tugas pokok di kantor.
2. Bapak Dr. Liestyodono B.Irianto,M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Yuli Tirtariandi El Anshori,S.IP,MAP selaku Kepala UPBJJ-UT Sorong yang telah memberikan motivasi, arahan dan dukungan kepada penulis mulai dari proses penyusunan sampai dengan penyelesaian tesis
4. Bapak Dr. H. Muh. Basri, M.Si. dan Bapak Dr. Iqbal Miftakhul Mujtahid, S.IP.,M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengsn sabar telah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing dan memotivasi serta mengarahkan penulis dari awal hingga sampai pada penyelesaian Tesis ini.

5. Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si selaku Dosen penguji dari Pra-Proposal yang memberikan masukan dan motivasi kepada penulis
6. Drs. H. Syamsudin Patang, M.Pd, MH selaku koordinator BBLBA UPBJJ-UT Sorong yang telah memberikan motivasi, dukungan dan banyak memfasilitasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Abraham Baibaba,S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Teluk Wondama yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat belajar di Universitas Terbuka.
8. Yudistira, S.Pd. selaku Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama yang juga turut andil dalam penyelesaian tesis ini.
9. Bapak Syamsuddin Usman, S.Pd. selaku Koordinator Pokjar Wondama yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi serta bimbingan kepada penulis mulai dari kuliah sampai dengan penyelesaian tesis.
10. Orang tua, mertua & Istri tercinta beserta anak-anak yang selalu mendukung perjuangan secara material maupun spiritual serta selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
11. Serta rekan-rekan mahasiswa(i) pada Program Studi Magister Administrasi Publik Pokjar Teluk Wondama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas kekompakan dan saling membantunya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa campur-tangan dari pihak-pihak tersebut. Tidak ada bentuk penghargaan lain yang dapat penulis ungkapkan, selain rasa syukur dan hormat yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sorong, Nopember 2017

Penulis,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Yudistira
NIM	:	500625352
Program Studi	:	Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir	:	Praya 14 Januari 1963
Riwayat Pendidikan	:	Lulus SD di SDN 4 Praya pada tahun 1975
		Lulus SMP di Mataram pada tahun .1979
		Lulus SMA di Praya pada tahun 1982
		Lulus S1 di Mataram pada tahun 1994
Riwayat Pekerjaan	:	Tahun 2004 s/d 2000 sebagai Guru di SD Inp Wsr
		Tahun 2010 s/d 2013 sebagai Kep Sek.SD In Tandia
		Tahun 2013 s/d Skrg sebagai Kep SKB di TW

Sorong, Nopember 2017

Yudistira

NIM. 500625352

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

DAFTAR ISI

		Halaman
Lembaran Judul/Tesis		i
Abstrak		ii
Abstrack		iii
Pernyataan Bebas Plagiat		iv
Lembar Persetujuan		v
Lembar Pengesahan		vi
Kata Pengantar		vii-ix
Riwayat Hidup		x
Daftar Isi		xii
Daftar Gambar		xiii
Daftar Tabel		xiv
Daftar Lampiran		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kajian Teori	8
	B. Penelitian Terdahulu	39
	C. Kerangka Berpikir	43
	D. Operasionalisasi Konsep	45
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	49
	B. Sumber Informasi dan Pemiliban Informan	50
	C. Instrumen Penelitian	52
	D. Prosedur Pengumpulan Data	52
	E. Metode Analisis Data	53
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Objek Penelitian	56
	B. Hasil	62
	C. Pembahasan	123

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 134
B. Saran 134

DAFTAR PUSTAKA 136
LAMPIRAN 138

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 45

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	39
Tabel 3.1	Daftar Informan	51
Tabel 4.1	Letak Geografis Kabupaten Teluk Wondama	56
Tabel 4.2	Presentase Luas Wilayah per Distrik	57
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016	58
Tabel 4.4	Jumlah Guru/Pegajar/Tutor (TK & PAUD) Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Wondama	59

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pedoman Wawancara..... 140

Lampiran 2. Transkip Wawancara 146

Lampiran 3. Dokumentasi /Foto – Foto 230

Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian 234

Lampiran 5. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian 235

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan tujuan nasional (*national goal*) yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia .

Dalam kontek pembangunan nasional menurut Dirjen Dikti (2003) sektor pendidikan memiliki posisi yang sangat penting. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupanbangsa yang telah diatur dalam undang-undang.

> *"Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 bertujuan untuk mengembangkan potensi para peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berahlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, cakap,kreatif, demokratis, bertanggung jawab dan bertaqwa kepadu Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Supriadi (2003) mengacu pada landasan konstitusional seperti yang terdapat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,bahwa penyelenggara pembangunan di sektor pendidikan dilaksanakon oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan dan program".*

Sejalan dengan hal tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menungah (RPJM) Kabupaten Teluk Wondama tahun 2016-2021 menyatakan sasaran pembangunan pendidikan adalah peningkatan akses masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terhadap pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan. Angka Partisipasi Murni pada tingkat Sekolah Dasar tahun 2010 terjadi penurunan sedangkan di tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 terjadi kenaikan. Sedangkan untuk jenjang SD/MI masih perlu ditingkatkan. Analisis terhadap capaian Angka Partisipasi Murni di berbagai jenjang tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat remaja yang merupakan anggota dari warga masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama yang masih belum menikmati pendidikan.

Menurut Hartono, dalam Implementasi Pendidikan Karakter pada Layanan Bimbingan dan Konsling (wahana 2011) Bimbingan Konsling sangat mempengaruhi pelayanan terhadap penuntasan tuna aksara, melalui Kemandirian Kreativitas dan kejujuran.

Menurut Endah Puspa Pratiwi, dalam Jurnalnya yang berjudul Pengembangan Pendidikan Non Formal melalui Program Keaksaraan Fungsional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (2013). Masyarakat yang mengalami Tuna Aksara tetap memiliki hak untuk dapat mengembangkan setiap kemampuan dan potensi setelah mereka terbebas dari Tuna Aksara. Warga masyarakat yang telah terbebas dari Tuna Aksara di arahkan ke Kewira Usaha Mandiri dan memberikan keterampilan-keterampilan praktis sehingga mereka dapat bekerja untuk menafkahi diri dan keluarganya.

Menurut Alfrendy Tatto dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Dasar (2017) Memberi motifasi warga agar tetap belajar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri, mengembangkan pendidikan keaksaraan. Warga Aksara di beri motivasi, setelah mereka

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terbebas dari aksara, mereka akan di berikan keterampilan praktis agar mereka memiliki bekal dalam berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut A, Mappatunru dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi ditemukan lemahnya Interprestasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan pada level Daerah, Pendidikan Kesetaraam atau Paket A, B. C akan berhasil dengan baik jika di mulai dari Penerimaan peserta, Proses pembelajaran dan hasil yang diinginkan.

Menurut Nurul Fauziyah dalam jurnalnya yang berjudul Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional untuk memberantas Buta Aksara di Petissari, Babaksari Dusun Gersik tidak ditemukan factor penghambat berbeda dengan hasil penelitian ini.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk yang masih tuna aksara adalah melalui penyelenggaraan program Paket A yang didukung dengan penurunan angka putus sekolah. Penyelenggaraan kegiatan Paket A yang bertujuan untuk mengurangi penduduk yang tuna aksara. Jumlah penduduk yang masih tuna aksara di Kabupaten Teluk Wondama masih cukup tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Program Kelompok Belajar Paket A. Upaya pelaksanaan Program Paket A terutama sekali ditujukan pada kawasan pedesaan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kecenderungan di daerah pedesaan masih tingginya angka tuna aksaranya.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rasicy Kabupaten Teluk Womdama adalah Satuan Pendidikan Nonformal ditentukan dinamika implementasinya di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lapangan. Para tutor aksara sebelum melaksanakan proses pembelajaran aksara harus mengikuti Diklat tutor aksara yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Berbagai pihak yang terlibat langsung atau tidak terutama para tutor aksara sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Atas dasar pemahaman tersebut menjadi menarik dan penting untuk mengkaji implementasi program pemberantasan tuna aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rasiey Kabupaten Teluk Wondama. Beberapa pemikiran dapat diajukan untuk mendukung argumen tersebut.

Aspek komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan penuntasan tuna aksara melalui program Kelompok Belajar (KEJAR) paket A akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, dan tindakan masyarakat tersebut tentunya sesuai dengan keinginan pemerintah. Banyak aspek yang turut serta menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan implementasi kebijakan program Tuna Aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Teluk Wondama. Salah satunya adalah tingkat pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan program Tuna Aksara itu sendiri. Pengetahuan di sini bukan hanya mengerti tentang maksut, tujuan, dan proses pelaksanaan, Pemberantasan Tuna Aksara melainkan jaga memahami hal-hal teknis dalam pelaksanaan program yang dimaksud. Dalam hal ini komunikasi menjadi salah satu kebutuhan yang mutlak dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan program tersebut. Karena komunikasi pada intinya memberikan informasi tentang arti pentingnya Implementasi kebijakan program Pemberantasan Tuna

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Aksara sehingga akan melahirkan pemahaman bagi masyarakat yang baik dan benar.

Implementasi kebijakan program Pendidikan Keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Teluk Wondama (SKB) Kabupaten Teluk Wondama merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan lancar dan efektif. Salah satu penyebabnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya antara lain: Aparatur, Sarana dan Prasarana, serta sumber pembiayayaan. Pelaksanaan program Penuntasan Buta Aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Teluk Wondama berfungsi untuk menuntaskan:

1. Buta Aksara tingkat dasar 66 jam
2. Aksara tingkat lanjut 33 jam
3. Aksara tingkat mahir 15 jam

Usia Warga belajar Aksara 15 tahun sampai dengan 59 tahun.

Standar pelaksanaan Program Aksara:

1. Identifikasi warga belajar aksara.
2. Rencana proses pembelajaran.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran .
4. Pengawasan proses pembelajaran.
5. Penilaian hasil pembelajaran.

Setelah warga aksara tersebut dapat menyelesaikan pembelajaran dan dinyatakan berhasil, maka sebagai bukti bahwa warga tersebut telah dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baca, tulis, hitung (CALISTUNG) dan dinyatakan tuntas, maka diberikan sertifikat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

B. Perumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan tuna aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan tuna aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan tuna aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama.
2. Untuk mengeevaluasi faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan tuna aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharaptan dapat menambah wawasan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Secara praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga khususnya Sanggar Kegiatan Belajar untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rengka menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implcmentasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

> *"Konsep Implementasi berasal dari bahasa Ingggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implemen (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)' (Webester sebagaimana dikutip dalam Wahab, 2004: 64). Sarana untuk dapat menimbulkan dampak dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, penyediaan anggaran dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan sebagai implementator.*

Selanjutnya oleh Imawan, 2009, dikatakan bahwa :

> *"Implementasi berarti upaya merealisasikan sebuah keputusan atau kesepakatan yang telah diambil. Dengan kata lain, hal-hal yang telah didifinisikan secara abstrak hendaknya diwujudkan dalam bentuk kongkrit"*

Dalam hal kebijakan puhlik, studi mengenai implementasi menjadi sangat penting, sebab implementasi juga diartikan sebagai *out put*, yaitu untuk melihat apakah aktifitas dan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan sebelumnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Implementsi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses yang dinamis dimana pelaksana kegiatan merupakan suatu aktifitas, sehingga tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang komplek dan bahkan bermuatan politis dengan adanya berbagai kepentingan.

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan merupakkan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilannya (Tachjan, 2006).Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Nugroho(2003: 160) menyatakan bahwa

> *"Dalam managemen sektor publik, kebijakan publik dari tahap formulasi hingga strategi, program kegiatan dan umpan balik".*

Dengan demikian, semakin jelas oleh Nugroho, 2003: 163

> *"bahwa implementasi kebijakan di dalam kontek managemen berada dalam kerangka organizing leading controling. Kemudian secara rinci kegiatan managemen implementasi kebijakan berurutan dari tahap implementasi, strategi, pengorganisasian. kebijakan menggerakkan kepemimpinan, dan pengendalian"*

Implementasi Kebijakan Publik Suatu program kebijakan yang telah dipakai sebagai alternatif untuk memecahkan masalah haruslah diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen ditingkat bawah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Harsel Nogi S Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang membumi bahwa

> "*Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, mengimplementasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi,* (Tangkilisan, 2003: 9).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya,unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interprestasi terhadap perencanaan program yang telah dibuat dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah agar terealisasinya program yang dilaksanakan.

2. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Inonesia, kebijakan dijelaskan sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar didalam pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan serta cara bertindak tentang (pemerintah,organisasi).

Mustopadidjaja (2003: 5) menyatakan bahwa

> "*Pada dasarnya kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, negara dan pembangunan*"

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan".

Menurut Carl Frerch (Wahab, 2002)dan (sebagaimana dikutip dalam Makinnudin dan Sasongo, 2006: 18) bahwa Kebijakan adalah

"Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Selanjutnya dalam buku tersebut dijelaskan juga bahwa menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bahwa kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktfitas tertentu atau suatu rencana. Dalam konteks penyelenggaran negara kebijakan (*policy*) diartikan sebagai segala ketetapan, keputusan dan semua bentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yadikatif.

Menurut Masduki (2007: 37),kebijakan dimaknai sebagai

"Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu".

Kebijakan diartikan pula sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Ada tiga aspek dalam kontek kebijakan yang sangat penting dipahami.Pertama, adanya isu-isu utama dalam kebijakan yang terkait dengan masalah sosial dimasa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.Kedua, proses guna memutuskan kebijakan yang akan dibuat harus mengacu pada peralatan atau sarana yang digunakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

oleh pembuat kebijakan tersebut dalam usaha untuk mencapai tujuan. Ketiga, instruksi dari aktor-aktor kunci atau *stakeholder* selama dalam proses perumusan kebijakan.

Pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah yang dihadapi, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan James E Anderson merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya kebijakan adalah mencakup pertanyaan lima W dan satu H yaitu:

- *What*, yaitu apa yang akan dikerjakan?
- *Why*, yaitu bagaimana cara untuk mengerjakannya?
- *Who*, yaitu siapa yang akan mengerjakannya?
- *Where*, yaitu dimana tempat pelaksanaan kebijakan tersebut?
- *How*, yaitu kapan kehijakan dilaksanakan?

Semua pertanyaan tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas dan tanggung jawab pelayanan yang diberikan lebih terarah serta memiliki aturan dan tujuan yang jelas. Ada banyak difinisi kebijakan publik yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dikemukakan oleh para ahli. Bahkan ada beberapa ahli yang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan masing-masing ahli memberi penekanan yang berbeda serta memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda pula.

Pengertian kebijakan publik menurut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (2003) adalah

> *"suatu keputusan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu,melakukan kegiatan tertentu dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang berwewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan negara dalam pembangunan bangsa".*

Kebijakan publik mengandung sekurang-kurangnya tiga komponen dasar, yaitu:

a. Tujuan yang luas dan jelas.
b. Sasaran yang spesifik.
c. Cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Didalam cara tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yaitu siapa pelaksananya atau implementatornya, seberapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan bagaimana sistem managemennya dan bagaimana keberhasilan atau bagaimana mengukur kinerja kebijakan atau dievaluasi.

Dye (sebagaimana dikutip dalam Islamy,2000: 18) menyatakan bahwa

> *"Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan",*

sedangkan Anderson (sebagaimana dikutip dalam Islamy, 2000: 19) menyatakan bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah".

Implementasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut, adalah:

a. Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu memiliki tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b. Bahwa kebijaksanaan negara itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
c. Kebijakan adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan Oleh pemerintah, jadi bukan apa yang pemerintah maksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
d. Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti: merupakan kuputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
e. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif)

Menurut Krismartini dkk (2008: 1-6) terdapat beberapa sudut pandang tentang kebijakan publik, yaitu:

a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.
b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah.
c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan.

Fredrich (sebagainana dikutip dalam Winarno, 2002: 16) menyatakan bahwa "Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu."

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Islamy (2000: 21) pengertian kebijakan publik memiliki implikasi:

a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetepan tindakan-tindakan pemerintah.
b. Bahwa kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan akan tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
d. Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa ketika kita berbicara kebijakan, maka konsep kebijakan adalah salah satu alternatif yang adalah sebagai suatu solusi terhadap permasalahan di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya diarahkan pada diri sendiri,kelompok atau lingkungan kerja. Berbicara kebijakan sering di lihat pada aktor atau pelaku kebijakan, Kebijakan kerap kali diarahkan pada lingkungan atau masyarakat luas.

Selanjutnya menurut Amir Santoso (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2002: 17) mengkomparasi definisi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain Pertama pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan pemerintah. Kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai publik. Kedua, khususnya ada para pelaksana.

Menurut Meter dan Horn (sebagaimana dikutip dalam Wibawa, 2000) mendefinisikan implementasi kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok baik pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan oleh pengambil kebijaksanaan sebelumnya".

Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan tersebut memperoleh pengesahan dari ligislatif dan alokasi sumber dananya, sehingga dalam pelaksanaannya efektif dan efisien.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. (Nugroho, 2003: 160) menyatakan bahwa "Dalam manajemen sektor publik, kebijakan publik dari tahap formulasi hingga strategi, program, kegiatan, dan umpan balik."

Dengan demikian, semakin jelas oleh Nugroho, 2003 : 163 mengatakan

"bahwa implementasi kebijakan di dalam kantek menegemen berada dalam kerangka organizing leading controling. Kemudian secara rinci kegiatan manajemen implementasi kebijakan berurutan dari tahap implementasi, strategi, pengorganisasian, kebijakan, menggerakan, kepemimpinan dan pengendalian"

Kebijakan sering dilaksanakan untuk mencapai maksud dan tujuan yang berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam kebijakan itu. Bahkan segala upaya dilakukan untuk meraih kebijakan, maka kebijakan menghendaki adanya pengarahan sumber daya. Sebagai syarat bagi berlangsungnya pengarahan sumber daya tersebut. Kebijakan juga mengatur perilaku para aktor dan sekaligus kebijakan harus melaksanakan "kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu menyentuh sumber daya, prilaku dan pemaksaan".

Kebijakan setelah menyentuh aspek prilaku,maka pemerintah pasti akan merumuskan kebijakan guna mengatur dan mengarahkan sumber

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

daya maupun mempersiapkan tata nilai yang memungkinkan pelaku yang diatur oleh kebijakan tersebut dan sebaliknya. Lebih lanjut bahwa guna mencapai tujuan kebijakan. Pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan. Menurut Danu (sebagaimana dikutip dalam Wibawa,2000: 4) bahwa

> *"Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut sebagai proses implementasi kebijakan.Tidak saja prilaku administratif dan organisasional melainkan juga prilaku politis".*

Makna implementasi kebijakan menurut Mazmanim adalah apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan maka akan merupakan fokus perhatian dari implementasi kebijakan.

Sementara Salusu (sebagaimana dikutip dalam Radjiin, 2002:15) mengatakan "Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu.

(Winarno 2002: 101) menyatakan bahwa

> *"Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut ia mengatakan dalam pengertian yang luas bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan"*

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat difahami sebagai proses, keluaran (*out put*) maupun sebagai hasil (Winarno, 2002: 102).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

(Islamy 2000: 27) menyatakan bahwa

"Semua kebijakan publik apapun bentuk dan jenisnya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan negara".

Kebijakan publik dibuat bukan untuk kepentingan politik saja,akan tetapi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu di dalam menetapkan kebijakan publik diperlukan suatu proses perumusan yang cukup bijaksana, hal tersebut bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan.

Proses perumusan kebijakan publik pada umumnya dimulai dari beberapa tahap mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan sampai dengan penilaian kebijakan.

Sementara menurut Fitriani (2007: 71), mengatakan

"bahwa dalam implementasi kebijakan, informasi tentang kebijakan di daerah sangat perlu dan penting dalam rangka mengawasi proses berlangsungnya pelaksanaan kebijakan"

Selanjutnya Fitriani (2007: 71) mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dicermati dalam proses implementasi kebijakan, adalah:

a. *Apakah strategi Implementasi telah di identifikasi, dipilih dan dirumuskan dengsn jelas ?*
b. *Apakah pelaksana teknis sudah siap ?*
c. *Siapakah aktor-aktor utama yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut ?*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. *Apakah prosedur pelaksanaan oprasional seperti buku petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah ada dan dikuasai oleh pelaksana ?*
e. *Bagaimana koordinasi pelaksanaan kebijakan akan dilakukan ?*
f. *Bagaimana, kapan, dimana, dan siapa sumber-sumber dilaksanakan ?*
g. *Apakah hak, kewajiban, kuasa dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami oleh pelaksana kebijakan ?*

Aktifitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Dalam pandangan Grindle (sebagaimana dikutip dalam Wibawa, 2000: 26) ada dua hal yang mempengaruhi aktifitas implementasi dalam proses politik dan administrasi, yaitu: *contents of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*) tipe manfaat (*type of benafits*) derajat perubahan yang diharapkan (*extement of change envisioned*) letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) pelaksana program (*program implementator*) dan sumber yang terlibat (*resources commited*).Yang dimaksud dengan *contexs of implementation* yaitu kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat (*power, interest,and strategies of actors*) karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*) dan kepatuhan serta daya tangkap (*compliance and responsiveness*).

Proses implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. baik faktor internal maupun faktor eksternal.Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 109) memformulasikan ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: a) Kejelasan standar dan tujuan kebijakan; b) Ketersedianya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti: staf, fasilitas fisik, informasi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagainya; c) Komunikasi yang baik seimbang dan jelas antara organisasi dan pelaksana; d) Karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan; e) Kondisi sosial ekonomi, politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan; dan f) Adanya ketersediaan dan komitmen dari pelaksana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama beserta warga masyarakat untuk menyukseskan implementasi kebijakan Program Keaksaraan di lapangan.

Menurut Agustino 2006,

> *"bahwa jika kebijakan tidak terpenuhi, jika tidak memakai cara-cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang telah ditentukan atau mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrim hasilnya nol"*

Selanjutnya (Agustino 2006) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik, antara lain: (a) Faktor Penentu pelaksanaan kebijakan, (b) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, (c) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, (d) Adanya sangsi hukum, adanya kepentingan publik, (e) Adanya kepentingan pribadi, masalah waktu.

Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan, yaitu: (a) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, (b) Tidak adanya kepastian hukum, (c) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, (d) Adanya konsep ketidak patuhan terhadap hukum.

Implementasi kebijakan terdapat heberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan. Pada dasarnya faktor-faktor

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tersebut meliputi isi dari kebijakan itu sendiri serta kondisi lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan.

> Menurut Wahab (sebagaimana dikutip dalam Abang Zainuddin, 2007: 130)
> "*bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan, yaitu: mudah tidaknya masalah dikendalikan tergantung pada kesukaran-kesukaran tehnis, keseragaman kelompok perilaku sasaran, prosentase sasaran dibanding jumlah sasaran dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan*".

Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi yang meliputi: (a) Kejelasan dan konsistensi tujuan digunakannya teori kausal yang memadai ketetapan sumber dana; (b) Keterpaduan hirarki di antara lembaga pelaksana, (c) Aturan-aturan dan keputusan dari lembaga pelaksana dan (d) Rekrutmen pejabat pelaksana akses formal di pihak luar.

Variabel di luar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah: kondisi sosial, ekonomi dan teknologi serta dukungan dari publik sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dan dukungan dari pejabat-pejabat atas, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Merujuk dari pendapat para ahli di atas nyatalah bahwa aktifitas Implementasi adalah sebuah kebijakan publik adalah sebuah aktifitas publik yang kompleks karena ada banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik tersebut. Namun kompleksitas implementasi kebijakan publik dapat diuraikan dengan menggunakan berbagai perspektif sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai. Dalam konteks penulisan ini kami mencoba untuk memahami

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

implementasi kebijakan publik dari beberapa variabel seperti organisasi pelaksana (birokrasi) masyarakat yang merupakan kelompok sasaran serta komunitas yang terjadi antara keduanya. Menurut Edwards (sebagaimana dikutip dalam Tangkilisan, 2003: 10) bahwa "Kedudukan birokrasi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan publik". Karena setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya. Sistem inilah dikenal dengan nama birokrasi berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisasi permasalahan, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, mengusulkan berhagai alternatif, merencanakan, mengorganisasi dan lain-lain dapat diselenggarakan. Sebagai sebuah konsep, birokrasi adalah sistem organisasi. Dalam birokrasi merupakan institusi yaitu memiliki struktur, prosedur dan anggota dengan ciri spesifik.

Struktur adalah pola atau cara organisasi mengatur sumber daya bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Berbagai komponen atau bagian dari struktur birokrasi diantaranya dapat berupa spesialisasi, formalisasi, besarnya organisasi dan ukuran unit kerja (Steers. 1980: 67).Menurut Edwards (sebagaimana dikutip dalam Tangkilisan, 2003: 13)

> *" bahwa elemen penting struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik mencakup fragmentasi dan prosedur operasian standar atau lazim di singkat dengan (POS) prosedur baku yang berlaku dalam aktifitas rutin dari kebijakan publik".*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Spesialisasi merupakan jumlah devisi yang bersifat khusus dalam organisasi. Formalisasi merupakan prosedur dan peraturan resmi yang menjadi patokan kegiatan kerja anggota organisasi. Besarnya organisasi merupakan ukuran yang menggambarkan batas-batas unit kerja yang terdapat dalam sebuah organisasi. Sedangkan anggota birokrasi adalah orang-orang yang bekerja dalam struktur dan prosedur birokrasi yang memiliki kemampuan tertentu dan dilandasi sikap kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Sikap patuh ini merupakan kesediaan anggota birokrasi. Untuk melaksanakan tugas yang di emban baik pemahaman terhadap tujuan dari tugas, ketaatan terhadap prosedur dan tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas.

Selain birokrasi, keberadaan masyarakat sebagai objek atau kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan tersebut yang juga memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Melalui dukungan masyarakat akan mempermudah atau memperlancar implementasi kebijakan publik. Bentuk dukungan di maksud dapat berupa kesediaan untuk menerima dan ikut serta secara aktif dalam Implementasi kebijakan publik tersebut. Adanya dukungan dari masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat respek terhadap otoritas pemerintah, kesadaran dan keyakinan, sistem nilai, sangsi hukum dan masalah waktu (Anderson sebagaimana dikutip dalam Islamy, 2000: 66). Jika berbagai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

faktor itu positif dalam arti baik maka tingkat dukungan masyarakat akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Nakamura (1980: 23) mencatat ada beberapa kreteria yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan salah satu diantaranya adalah kepuasan target group. Kepuasan target group ini akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sikap kesediaan mereka dalam menerima dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Disamping komunikasi birokrasi keberadaan komunikasi juga merupakan aspek penting di dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi/pesan dengan menggunakan lambang yang memiliki arti diantaranya dua orang atau lebih. Menurut Edward (sebagaimana dikutip dalam Tangkilisan, 2003: 19)

> *"bahwa ada tiga aspek komunikasi didalam implementasi kebijakan publik, yaitu: transmisi, kejelasan dan konsisten. Transmisi berkaitan dengan pemberian atau penyebaran informasi yang berkenaan dengan kebijakan publik itu sendiri. Sedangkan kejelasan berhubungan dengan sejauh mana proses transmisi terjadi secara akurat. Sementara konsistensi adalah sejauh mana informasi yang ditransmisi/disampaikan tetap tidak berubah-ubah atau tetap konsisten".*

Selanjutnya menurut Edward (sebagaimana dikutip dalam Agustino, 2006: 156) mengatakan ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi suatu kebijakan publik, variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

b. Sumber Daya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Disiplin

d. Struktur Organisasi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Abang Zainudin (2006: 131),

> *" bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan publik adalah "Faktor komunikasi, lingkungan, organisasi, dan dukungan dari sumber-sumber yang potensial",*

sedangkan menurut Islamy (2000: 63), ada sembilan faktor yang menyebabkan kebijakan publik tidak memperoleh hasil atau dampak yang diharapkan, yaitu:

a. Sumber-sumber yang terbatas baik tenaga maupun biaya, material dan waktu.

b. Kesalahan di dalam pengadministrasian kebijakan.

c. Problim-problim publik sering kali timbul disebabkan karena beberapa faktor.

d. Masyarakat melaksanakan kebijakan dengan caranya sendiri.

e. Adanya beberapa tujuan dari kebijakan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

f. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang lebih besar dari masalahnya sendiri.

g. Problem publik yang tidak terpecahkan secara tuntas.

h. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dilaksanakan.

i. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik sehingga mengabaikan masalah yang ada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak semuanya dapat berjalan dengan baik, ada kalanya banyak kebijakan yang dalam proses implementasinya menghadapi permasalahan. Kebijakan juga sering tidak memperoleh dukungan, bahkan mendapat tantangan dari kelompok-kelompok tertentu atau dari kelompok pelaksana kebijakan itu sendiri.

Menurut Winarno (2002: 158), ada enam tipe kebijakan yang memiliki potensi menimbulkan masalah, yaitu: (a) Kebijakan baru, (b) Kebijakan yang didesentralisasikan, (c) Kebijakan kontroversial, (d) Kebijakan yang kompleks, (e) Kebijakan yang berhubungan dengan masalah krisis, dan (f) Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.

5. Konsep dan Kebijakan Pendidikan Nonformal

a. Pengertian Pendidikan Nonformal

Suwondo (2003: 13) menyatakan bahwa

> *"Pendidikan adalah sebuah proses dalam regenerasi bangsa guna menciptakan sumber daya manusia yang tangguh untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan"*

Oleh sebab itu, penyelenggara pendidikan tidak bisa terlepas dari perspektif manusia dan kemunusiaan. Pengedepanan faktor manusia dalam proses pendidikan diharapkan mempunyai implikasi bagi pengembangan kehidupan masyarakat baik secara sosial, kultural, idiologi, dan sebagainya. Berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia tidak hanya sekedar untuk hidup (*to live*) tetapi juga berinteraksi (*to exist*) sehingga manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan melakukan tindakan apapun. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menhasilkan manusia yang merdeka, pendidikan harus merupakan bagian dari proses pembebasan dan pemherdayaan.

Untuk lebih jelasnya maka dikemukakan beberapa definisi pendidikan. Menurut M.J. Langeveld (sebagaimana dikutip dalam Supardi, 2003: 44) menyatakan :

> *"bahwa Pertama, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Kedua, pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil baliq, dan bertanggung jawab. Ketiga, pendidikan adalah usaha agar mencapai penentuan diri susila dan bertanggung jawab.*

Kohnstamm dan Gunning (sebagaimana dikutip dalam Supriadi, 2003: 49) menyatakan:

> *"bahwa Pendidikan adalah pembentukan hati nurani, pendidikan adalah proses pembentukan diri penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani".*

Paolo Freire (sebagaimana dikutip dalam Supriadi 2003: 51) menyatakan bahwa

> *"Pendidikan para humanis dan pembebas yang terdiri dari dua tahap. Pertama pendidikan harus membahas mengenai kesadaran yang mencakup masalah prilaku, pandangan dunia dan etika. Kedua pendidikan bukan hanya memiliki salah satu strata dalam masyarakat akan tetapi pendidikan bagi keseluruhan manusia dalam proses mencapai kebebasan yang langgeng".*

Program Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

b. Jenis dan Sasaran Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Adapun jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja. Pendidikan Kesetaraan meliputi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil dari pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian pernyataan dari lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Peserta didik program Paket A setara SD/MI adalah warga masyarakat yang belum menempuh pendidikan di SD/MI dengan prioritas usia 13 - 15 kecuali bagi peserta didik yang menentukan Paket A atas pilihan sendiri. Mereka tidak dapat sekolah karena berbagai faktor (waktu, geografis, ekonomi, sosial, budaya hukum dan keyakinan). Verifikasi hasil belajar yang diperoleh dibuktikan dengan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) butir (e) mengatur hak peserta didik untuk pindah dari jalur pendidikan informal dan pendidikan formal ke jalur pendidikan nonformal atau sebaliknya. Peserta didik dari pendidikan informal dan pendidikan formal yang pindah ke pendidikan kesetaraan harus melalui proses.

Dengan bermunculannya pendidikan nonformal di sekitar kita, maka diharapkan anak akan mendapatkan nilai dan ilmu lebih dari apa yang telah mereka dapatkan di sekolah dan lingkungan keluarganya. Sesungguhnya pendidikan nonformal adalah pendukung dari pendidikan formal yang anak-anak wajib hukumnya mendapatkan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Pendidikan nonformal juga pendukung dari pendidikan informal yang anak-anak harus terima dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini menyangkut pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral dan sosialisasi yang seharusnya diperkenalkan perdana sekali oleh kedua orang tua mereka. Terkadang tidak sedikit orang tua yang melupakan peran pentingnya dalam mengutamakan pendidikan informal melalui tangan mereka sendiri.Mereka lebih puas jika pendidikan informal itu menjadi tugas rangkap para pendidik di pendidikan nonformal. Lihat saja sekarang, anak usia dibawah 3 tahun saja sudah banyak yang dididik di PAUD padahal sudah menjadi peran penting orang tualah pendidikan anak usia dini. Segala sesuatu harus berawal dari keluarga karena hal itulah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang akan menciptakan kepribadian anak nantinya. Intinya, pendidikan nonformal hanyalah pendukung dari segala jenis pendidikan.

Dengan demikian, nampak bahwa pendidikan nonformal pada dasarnya lebih cenderung mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah proses dan program, yang secara esensial, berkembangnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan *concern* terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik,, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain. Sementara pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok. Untuk memenuhinya, maka partisipasi warga harus didasari kebebasan tanpa tekanan dalam kemampuan berpartisipasi dan keingin berpartisipasi.

c. Peran Pendidikan Nonformal

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan mengembangkan potensinya, maka peran pendidikan nonformal sangat strategis.

> *Pendidikan Luar Sekolah atau pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya (Coombs, dalam Sudjana, 2000: 23).

Kehadiran berbagai PAUD dan lembaga pendidikan nonformal yang kian beredar di sekitar kita menunjukkan betapa pedulinya oknum pendidik nonformal terhadap dunia pendidikan nonformal. Ini akan sangat membantu para orang tua yang menginginkan nilai lebih yang dihasilkan anak-anak mereka sebagai bentuk pendukung pendidikan formal yang anak terima di sekolah. Dalam hal ini peran penting pendidikan nonformal sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan yang bertujuan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat bergerak sebagaimana mestinya. Masyarakat patut bersyukur dengan keberadaan pendidikan nonformal maka kebutuhan anak-anak dalam mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal mereka bisa terpenuhi. Sebut saja berbagai contoh yang ada di sekitar kita saat ini; dengan adanya Sanggar Kegiatan Belajar yang menawarkan pembelajaran seperti di sekolah formal tapi dengan keringanan jam belajar membantu anak-anak untuk tetap bersekolah di waktu mereka yang mungkin tidak sefleksibel anak-anak di sekolah formal. Pengadaan Program Paket A, B dan C oleh pendidikan nonformal membantu semangat anak-anak yang tidak lulus sekolah formal kembali berkobar karena peraturan pemerintah yang menyatakan ijazah mereka setara dengan anak-anak yang menimba ilmu di sekolab formal. Kemunculan banyaknya PAUD cukup

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

meringankan beban orangtua yang mungkin sebagian besar waktunya terkuras akan dunia karir mereka. Di PAUD, anak-anak dipastikan mendapatkan dasar pendidikan formal sebagai bekal mereka sekolah nanti dan tambaban pendidikan informal sebagai pelengkap pendidikan informal yang mereka dapatkan di lingkungan keluarga. Banyaknya Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar yang kian marak di sekitar kita dapat menjadi penambah dan pelengkap ilmu yang anak-anak peroleh di sekolah formal. Dengan demikian dapat disimpulkan babwa sungguh besar peran dunia pendidikan nonformal untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Ciri-ciri Pendidikan Nonformal

Menurut Faisal (t.t), pendidikan nonformal mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

1) Berjangka pendek pendidikannya.
2) Program pendidikannya merupakan paket yang sangat khusus.
3) Persyaratan pendaftarannya lebih fleksibel.
4) Sekuensi materi lebih luwes.
5) Tidak berjenjang kronologis.
6) Perolehan dan keberartian ijazah tidak seberapa terstandarisasi. Contoh: kursus, penataran, dan latihan.

Sementara itu, menurut Kleis et.al. (1986) bahwa :

"ciri-ciri pendidikan nonformal adalah biasanya berkaitan dengan misi yang mendesak dan praktis, tempat pendidikan biasanya di luar kelas atau di situasi belajar yang sebenarnya,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bukti memiliki ilmu pengetahuan dinilai dari keterampilannya (bukan dari sertifikatnya), biasanya tidak terlalu terikat dengan ketentuan yang ketat, isi, staf atau strukturnya tidak terorganisasi, peserta biasanya bersifat sukarela, biasanya merupakan aktivitas sampingan, pelajaran jarang bertingkat dan berurutan, biaya pendidikan biasanya lebih murah dari pendidikan formal, persyaratan penerimaan pesertanya lebih ringan, penilaian keberhasilan peserta berdasarkan kemampuan mendemonstrasikan keterampilan, dan tidak terbatas untuk peserta dan kurikulum tertentu, tetapi dapat diperbarui dan dikembangkan"

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pendidikan nonformal sekurang-kurangnya adalah merupakan pendidikan luar sistem persekolahan, jarang berjenjang, tidak ketat ketentuan-ketentuannya.

6. Pengertian dan Konsep Tuna Aksara

a. Pengertian Tuna Aksara

Tuna aksara adalah ketidak mampuan membaca dan menulis baik bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Tuna aksara juga dapat diartikan sebagai ketidak mampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan saat ini kata tuna aksara diartikan sebagai ketidak mampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Faktor-faktor Yang Membuat Seseorang Tuna Aksara

Faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi tuna aksara, diantaranya:

1) Kemiskinan.

Kemiskinan adalah faktor utama yang membuat seseorang menjadi tuna aksara. Karena untuk makan sehari-hari juga masih sulit apalagi untuk mengenyam bangku sekolah, meskipun sekarang sudah ada yang

namanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tapi dana tersebut banyak dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Orang tua yang tuna aksara memiliki kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya.

Orang tua enggan menyekolahkan anaknya karena orang tua nya sendiri tidak bisa calistung.

3) Jauh dengan layanan pendidikan.

Layanan pendidikan yang jauh juga menjadi faktor seseorang menjadi tuna aksara, contohnya saja di daerah pedalaman atau daerah terpencil sangat jauh ke sekolah dasar sekalipun, apalagi ke sekolah lanjutan. Mereka yang di daerah terpencil harus berangkat pagi-pagi sekali atau jam lima pagi karena jarak rumahnya dengan sekolah sangat jauh.

4) Orang tua menganggap bahwa sekolah itu tidak penting.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Orang tua menganggap bahwa sekolah adalah perbuatan yang sia-sia, tidak penting dan lebiih baik menyuruh anak mereka untuk membantu berladang, berternak, berjualan,menggembala hewan, atau bahkan mereka menyuruh anak mereka untuk mengemis atau ngamen di jalan.

c. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberantas Tuna Aksara

Banyak sekali kendala yang dihadapi pemerintah untuk memberantas tuna aksara mulai dari peserta didik sampai kepada anggaran biaya untuk kegiatan tersebut. Kendala tersebut dapat diperinci, sebagai berikut:

1) Keterbatasan kemampuan peserta didik berbahasa Indonesia sehingga proses pembelajaran terhambat.

   Peserta didik biasanya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga terjadi kendala yang dihadapi oleh pengajar yang mengajar karena tidak nyambungnya bahasa yang dipergunakan, pengajar menggunakan bahasa Indonesia sedangkan peserta didik berbahasa daerah.

2) Peserta didik kurang aktif dan masih malu-malu untuk mengikuti pembelajaran.

   Peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran mungkin karena peserta didik bosen dan malas dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan malu untuk mengikutinya. Sehingga banyak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang sudah mengikuti kegiatan tersebut yang tidak melanjutkan lagi.

3) Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Masih banyak ditemui anak usia sekolah yang seharusnya mereka berada di sekolah tapi mereka malah berada di tempat-tempat yang tidak layak, contohya mereka mengamen dan mengemis di perempatan di kota-kota besar, ada juga yang memulung sampah baik di tempat pembuangan sampah atau di jalan-jalan, kalau di pedesaan banyak yang menggembalakan hewan ternaknya.

4) Banyak yang putus sekolah setiap tahunnya.

Banyak anak usia sekolah yang sudah bersekolah setengah jalan tapi tidak dilanjutkan atau putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh factor kemiskinan. Meskipun sudah ada Bantuan Operasional Sekolah tapi sebagian dari mereka tidak menikmati dana tersebut karena diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

5) Pengajar yang kurang Profesional

Pengajar harus seprofesional mungkin, pengajar harus mempunyai cara-cara dalam proses pembelajaran dan pengajar harus di beri pelatihan lagi oleh dinas pendidikan.

6) Program pemberdayaan bukan sebagai program berkelanjutan tapi hanya program sesaat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Program memberantas tuna aksara yang seharusnya menjadi program berkelanjutan malah menjadi program sesaat. Hal ini bisa terjadi karena pengajar dan peserta didik bosan dan bisa juga anggaran atau gaji untuk para pengajar tidak lagi turun.

7) Kemampuan pemerintah (dalam penyediaan dana) yang terbatas.

Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan mininmal 20% di APBDnya, namun anggaran tersebut sering diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

d. Cara Penyelesaian Buta Aksara

Tuna aksara dapat diselesaikan dengan berbagai cara, diantaranya dengan:

1) Mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah.

Pemerintah harus berupaya untuk menekan anak usia sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan, maupun yang diakibatkan oleh jauh dari layanan pendidikan.

2) Membuat cara-cara baru dalam proses pembelajaran.

Membuat cara-cara yang baru yang asyik agar peserta didik tidak bosan untuk belajar dan menjaga kemampuan beraksara bagi peserta didik.

3) Adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah.

Pemeerintah harus mempunyai niat yang baik, sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas tuna aksara dalam usaha untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

4) Perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya percepatan pemberantasan tuna aksara.

Pemberantasan tuna aksara bukan saja tugas pemerintah semata akan tapi itu tugas kita semua selaku generasi penerus bangsa. Jadi semua pihak harus berpartisipasi untuk memberantas tuna aksara, contohnya ibu-ibu PKK harus ikut serta, organisasi masyarakat (Ormas), mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan anggota TNI yang mempunyai program TNI Manunggal Aksara.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut Tabel Penelitian dan artikel yang meneliti beberapa indicator yang sama dengan yang di teliti penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	*Nama Pengarang / Peneliti*	*Judul*	*Thn*	*Media Penerbitan*	*Temuan*	*Variabel*
1	*Hartono*	*Imlementasi Pendidikan Karakter pada Layanan Bimbingan dan Konseling*	*2011*	*Wahana,Vol.57,No.2. Des*	*Bimbingan Konseling sangat mempengaruhi pelayanan Martabat*	*KemandirianKeraitivitas dan Kejujuran*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2.	A.Mappatunru	Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provins	2015	UN.Yogjakarta	Lemahnya Interprestasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan pada level Daerah	Imlementasi,Kesetaraan
3	Endah Puspa Pratiwi	Pengembangan Pendidikan Non Formal melalui Program Keaksaraan Fungsional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	2013	Jurnal Riset & PKM Vol.2 No.2 Hal.147-300	Masyarakat yang mengalami Buta Aksara tetap memiliki Hak untuk dapat mengembangkan setiap kemampuan dan patensi	Pendidikan Non Formal, Keaksaraan Fungsional dan PKBM
4.	Nurul Fauziyah	Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional untuk memberantas Buta aksara di Petissari,Babaksari Dukun Gresik	2014	Jurnal Kependidikan Islam Vol.4,No1 Tahun 2014	Tidak ditemukan faktor penghambat	Kaksaraan Fungsional, Buta Aksara
5	Alfrendy Tatto	Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan dasar	2017	Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 4	memotivasi warga agar tetap belajar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri, mengembangkan pendidikan keaksaraan	Implementasi Kebijakan, Pendidikan Keaksaraan Dasar, PKBM Persada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

				Vol.VI Tahun 2017	*dasar agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi warga belajar*	

Sumber : Penulis,2017

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Berdasarkan dari beberapa kajian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan pendidikan nonformal oleh Yuniami (2007). Dalam penelitian yang dilakukan tersebut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun. partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun, serta peran para petugas dalam mengimplementasikan wajib belajar sembilan tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar sembilan tahun dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu fase inisial pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun dimaksudkan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada fase partisipasi warga sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kepada kemandirian. Pada fase emansipatoris diharapkan dapat meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan bagi Peningkatan kesejahtaraan dalam rangka meningkatnya jumlah anak usia 12-15 tahun yang mengikuti program wajib belajar sembilan tahun.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Partisipasi masyarakat di dalam mendukung implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun meliputi ruang lingkup, jenis bidang prestasi, Partisipasi masyarakat secara sukarela bersedia membantu pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun kontrol pengawasan serta penilaian masyarakat belum berjalan secara optimal. Jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang paling tinggi adalah partisipasi warga di dalam menyiapkan warga belajar. Sedangkan partisipasi lainny berupa tanggapan, pendapat,saran,pikiran, prakarsa di dalam mendukung pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun serta adanya keinginan warga masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan belajar bagi Paket A,Paket B, dan Paket C yang kegiatan belajarnya dilaksanakan pada sore hari yang dimulai dari jam 15.00 sampai jam 17.00 Wit. Partisipas warga di dalam memperhatikan,menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan tentang kebijakan wajib belajar sembilan tahun cukup tinggi. Partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Peran petugas dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar sembilan tahun meliputi peran fasilitatif dan edukasional di dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar sembilan tahun agar berjalan dengan optimal. Indikasi hal tersebut adalah:

1. Proses perencanaan belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Penganggaran dalam implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Teluk Wondama setiap tahunnya serta dari dana lain seperti DAK, APBD Provinsi dan APBN masih belum memadai.
3. Pengendalian dan evaluasi kebijakan Wajib Belajar sembilan tahun tidak terlaksana secara efektif.

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya lebih difokuskan pada wajib belajar sembilan tahun yang artinya masih bersifat umum. Peneliti sebelumnya lebih banyak melihat dari aspek pemberdayaan masyarakat dan proses pelaksanaan ataupun pengelolaan kebijakan program wajib belajar sembilan tahun. Penelitian ini lebih fokus pada implementasi kebijakan pendidikan nonformal khususnya Program Kelompok Belajar Paket A pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rasiey dalam usaha untuk menuntaskan tuna aksara di Kabupaten Teluk Wondama.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan gambaran di atas, dasar kehijakan pelaksanaan pendidikan nonformal khususnya program Paket A di Kabupaten Teluk Wondama adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kebupaten Teluk Wondama yang menegaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang bermanfaat sebagai pengganti, penambah, pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut statistik jumlah penduduk tuna aksara di Kabupaten Teluk Wondama masih cukup tinggi, yaitu 46,87% dari keseluruhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama khususnya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rasiey sebagai Satuan Pendidikan Nonformal yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dituntut untuk dapat terus menekan atau mengurangi jumlah penduduk tuna aksara tersebut.

Agar dapat mewujudkan konsepsi ideal untuk mengurangi jumlah penduduk tuna aksara tersebut perlu ditindak lanjuti ke dalam berbagai strategi kebijakan dan program yang tepat dan akurat. Salah satu upaya agar dapat menghasilkan suatu strategi kebijakan dan program tepat, jelas dan akurat maka terlebih dahulu harus diawali dengan pemahaman yang cermat tentang situasi dan kondisi objektif yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan nonformal khususnya program kejar Paket A pada Sanggar Kegiatan Belajar dalam upaya untuk menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama.

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

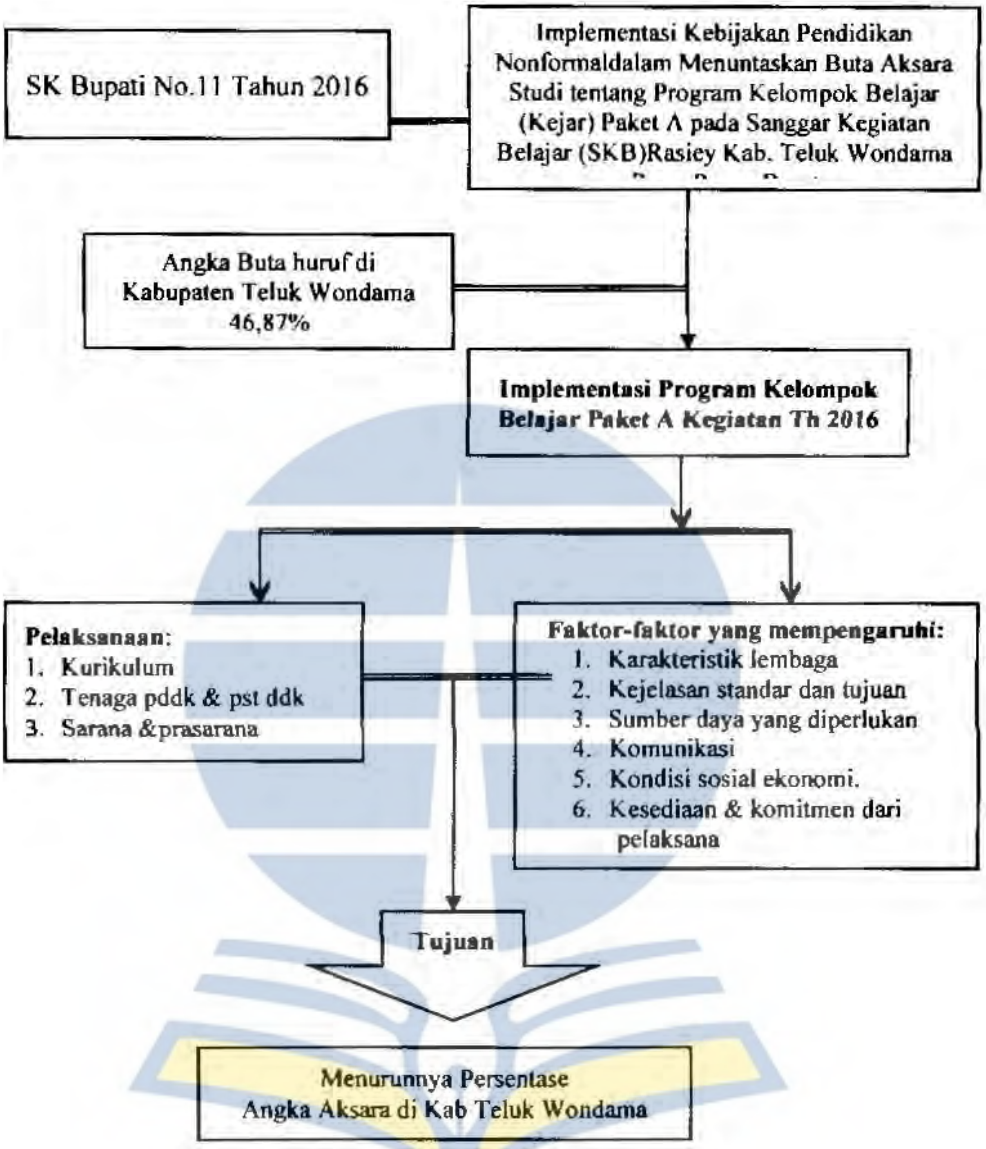

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir

D. Model Penelitian

1. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih suatu tujuan yang diinginkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa.
3. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana,terstruktur,tersusun dengan rapi dengan tujuan agar memperolch hasil yang lebih baik. untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran diharapkan agar peserta didik diharapkan agar lebih aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia dan keterampilan yang diminati agar berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Tuna aksara adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu membaca,menulis dan berhitung.
5. Prosentase tuna aksara adalah angka yang menunjukkan jumlah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu membaca, menulis dan berhitung jika dibandingkan dengan mereka yang melek aksara.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur informal, formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Pendidikan nonformal adalah semua jalur pendidikan yang berada di luar pendidikan formal, yang pelaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal setara dengan SD/MI bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau yang berminat dan memilih melalui jalur Kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan.
9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kesetaraan memuat komponen mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional dan yang tidak di ujikan, keterampilan fungsional, muatan lokal, seni budaya, pendidikan jasmani dan pengembangan diri.
10. Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan harus memiliki kompetensi padagogik, profesional dan sosial serta didukung dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai.
11. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah atau memperlancar suatu aktifitas tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Sumber daya yang penting adalah staf dalam ukuran yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14. Komunikasi adalah koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk keberhasilan suatu program.
15. Karakteristik pelaksana, mencakup struktur birokrasi,norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
16. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan baik yang mendukung maupun yang menolak, bagaimana opini publik yang ada di lingkungan, apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Suryabrata (2001), penelitian deskriptif adalah untuk membuat, menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu. Menurut Azwar (2002),

> *"bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu masalah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Berdasarkan pendapat tersebut dikeahui bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang fakta - fakta dan karakteristik mengenai masalah tertentu, serta berusaha untuk menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata".*

> *"Penelitian kualitatifyang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan, dari orang-orang yang dapat diamati" (Moleong, 2008)*

> *Penelitian kualitatif di maksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya prilaku, persepsi, motifasi,tindakan lainnya secara holistic yang kemudian di analisis dalam kerangka mendapatkan gambaran dari obyek yang akan diteliti*

> *Sugiono (2009) menjelaskan bahwa " metode penelitian kwalitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci" Kemudian dalam tehnik pengumpulan datanya di lakukan secara trianggulasi (gabungan)*

Alasan menggunakan rancangan/desain penelitian deskriptif di dalam penelitian ini adalah karena dianggap sesuai dengan penjelasan masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan nonformaldi dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menuntaskan Tuna Aksara yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Rasiey di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yaitu mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2017.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama.
2. Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama.
4. Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama.
6. Kepala Bidang Pendidikan Non FormalKabupaten Teluk Wondama.
7. Kepala Seksi Dikmas Pendidikan Non Formal Kabupaten Teluk Wondama.
8. Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama.
9. Pamong Belajar Keaksaraan dan Kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Rasiey Kabupaten Teluk Wondama.
10. Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama.
11. Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama.
12. Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama.
13. Pensiunan guru di Kahupaten Teluk Wondama.
14. Pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama.
15. Warga belajar aksara di Kabupaten Teluk Wondama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemilihan jumlah informan dilakukan secara *purposive*, yaitu informan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan dimana alat pengumpulan data dilakukan dengan penunjukan sebelumnya sesuai dengan karakteristik warga aksara yang akan diteliti. Informasi lain berasal dari aparat desa, Kepala Seksi Dikmas, Pamong Aksara, Tutor Aksara, dinas/insansi terkait serta pemuka masyarakat yang mengetahui tentang kegiatan penuntasan Buta Aksara.

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga	1 Orang
2.	Kepala Bapeda	1 Orang
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan	1 Orang
5.	Sekretaris Pemberdayaan Perempuan	1 Orang
6.	Kepala Dinas Sosial	1 Orang
7.	Kepala Seksi Dikmas Pendidikan Non Formal	1 Orang
8.	Staf Ahli Bidang SDM	1 Orang
9.	Pamong Belajar Keaksaraan dan Kesetaraan	1 Orang
10.	Kepala Distrik Wondiboy	1 Orang
11.	Ketua Forum Aksara	1 Orang
12.	Ketua HIMPAUDNI	1 Orang
13.	Pensiunan Guru	1 Orang
14.	Pensiunan PNS	1 Orang
15.	Warga Belajar Aksara	1 Orang
	Jumlah Total	**15 Orang**

Sumber : Penulis, 2017

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Instrumen Penelitian

Untuk melakukan penelitian sebelumnya harus membuat instrumen penelitian yang berfungsi sebagai salah satu sarana dalam pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder menggunakan dokumenter, yakni berkaitan dengan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman observasi adalah catatan yang telah persiapkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang dalam hal ini adalah implementasi kebijakan pendidikan nonformal khususnya program penuntasan tuna aksara di Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pedoman wawancara adalah alat pengumpulan data yang dalam penelitian ini dengan cara mengajukan pertanyaan secara terpadu kepada warga belajar keaksaraan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen dengan menggunakan kuesioner atau angket, dengan cara wawancara dan dokumenter. Dalam pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Teknik observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung pada objek yang akan diteliti. Teknik observasi ini sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang akan diselidiki, yaitu: pada saat pelaksanaan, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik serta sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pendidikan nonformal yaitu penuntasan tuna aksara yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rasiey Kabupaten Teluk Wondama.

2. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur pedoman wawancara dengan tujuan agar tersedianya data primer yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam melakukan wawancara kepada informan kunci dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondama.
3. Dokumen review yaitu dokumen yang terkumpul dari Dinas Kendidikan dan Olah Raga Kabupaten Teluk Wondamadan sebagainya yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan tersebut.

E. Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2006: 34) agar mencapai tujuan penelitian, maka dipergunakan satu metode. Oleh karena itu, agar penulis dapat mencapai tujuan tersebut, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti dan diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk memperoleh data yang ada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data."(Moleong,2000:103)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data normatif kualitatif yang terdiri dari 3(tiga) alur kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data. (Maman,2001:1-3), yaitu:

1. **Reduksi Data**

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, mengkode, menelurus tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

2. **PenyajianData**

   Penyajian dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya tertuang dalam berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinana dan yang penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

   Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverivikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, meminta respon atau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

komentar kepada responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan peneliti, kekokohannya, kecocokannya.

4. Pengambilan Keputusan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverivikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan pengambilan keputusan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang terdapat dilapangan selama penelitian. Setelah data tersebut sesuai, maka dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada. Tahapan analisis data kualitatif di atas melibatkan beberapa komponen data interaktif yang merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisa data.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Keadaan Wilayah Kabupaten Teluk Wondama

a. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat berada pada posisi teluk yang dikelilingi oleh pegunungan dan lautan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai letak geografis Kabupaten Teluk Wondama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Kondisi Wilayah Kabupaten Wondama	Terletak pada 0^0,15" hingga 3^0,25" Lintang Selatan dan 132^0,35" hingga 134^0,45" Bujur Timur.
Kabupaten Teluk Wondama Terdiri dari	13 Distrik/Kecamatan, 75 Kampung dan 1 Kelurahan.
Luas Wilayah	14.953,8 km^2
Jumlah Penduduk Kabupaten Teluk Wondama	L = 15.979, P = 13.821, Total = 29.791
Batas-batas wilayah	Sebelah Utara berbatasan dengan Dsitrik Ransiki Kabupaten Manokwari dan Teluk Cederawasih. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Yaur Kahupaten Nabire. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Kuri dn Idoor Kabupaten Teluk Bintuni. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Yaur Kabupaten Nabire dan Teluk Cenderawasih.
Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi.	110 mil Laut

Sumber : Wondama Dalam Angka 2016

Tabel 4.1
Letak Geografis Kabupaten Teluk Wondama

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Luas Wilayah Setiap Distrik

Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat terdiri atas 13 Distrik, yaitu: Naikere, Wondiboy, Rasiey, Kuriwamesa, Wasior, Teluk Duairi, Roon, Windesi, Nikiwar, Wamesa, Roswar, Rumberpon, dan Soug Jaya.

Untuk lebih jelasnya informasi mengenai luas wilayah per Distrik di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Distrik	Luas (km2)	Rasio Terhadap Total	Jumlah Penduduk (Populasi)	Kepadatan per- km^2
1	Naikere	1.775,2	11,87 (12%)	651	0,37
2	Wondiboy	233,1	1,56 (2 %)	1.673	1,177
3	Rasiey	1,041,0	6,96 (7 %)	2.960	2,843
4	Kuriwamesa	678,0	4,53 (4 %)	1.174	1,732
5	Wasior	1,158,2	7,75 (8 %)	13655	11,790
6	Teluk Duairi	1,152,0	7,70 (8%)	1.852	1,608
7	Roon	1890,0	12,64 (13%)	1.314	0,695
8	Windesi	594,0	3,97 (4%)	1.571	2,645
9	Nikiwar	467,1	3,18 (3 %)	703	1,477
10	Wamesa	792,0	5,30 (5%)	587	0,741
11	Roswar	1,099,0	7,35 (7%)	571	0,520
12	Rumberpon	2,984,2	19,96 (20%)	1.796	0,602
13	Soug Jaya	1,081,0	7,23 (7%)	591	0,547

Sumber : BPS Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016.

Tabel 4.2.
Presentase Luas Wilayah per Distrik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Teluk Wondama

Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, terdiri dari: SD, SMP, SMA, Diploma I, II dan III, Diploma IV, Sarjana (S1), dan Sarjana (S2).

Untuk lebih jelasnya informasi mengenai tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Level Pendidikan	Laki-laki	Perempun	Jumlah
1.	Sampai dengan SD	24	3	27
2.	SMP	51	18	69
3.	SMA	572	273	845
4.	Diploma I,II dan III	230	270	500
5.	Diploma IV	13	1	14
6.	Sarjana (S1)	415	348	663
7.	Sarjana (S2)	13	3	16

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016

3. Jumlah Guru/Pegajar/Tutor (TK & PAUD) Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Wondama

Jumlah Guru/Pegajar/Tutor (TK & PAUD) Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No.	Distrik	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah Siswa	Jumlah Pengajar
			(L)	(P)		
1.	Naikere					
2.	Wondiboy	4	87	90	177	12
3.	Rasiey	5	108	116	224	14
4.	Kuriwamesa	1	5	20	45	3
5.	Wasior	15	135	141	276	52
6.	Teluk Duairi	4	128	132	260	14
7.	Roon	3	59	53	112	4
8.	Windesi	4	102	118	220	12
9.	Nikiwar	2	79	80	159	6
10.	Wamesa	2	75	80	155	6
11.	Roswar	1	35	48	83	6
12.	Rumberpon	3	66	72	138	11
13.	Soug Jaya	1	20	18	38	3

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016.

Tabel 4.4
Jumlah Guru/Pegajar/Tutor (TK & PAUD) Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Wondama

4. Profil Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama

Profil Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Identitas

1.	Nama Lembaga	:	Sanggar Kegiatan Belajar
2.	Alamat	:	Jl. Raya Wasior Rasiei Kabupaten Teluk Wondama
3.	No Telp/Hp	:	0821 9910 4550
4.	Nama Kepala Sanggar	:	Yudistira, S.Pd.
5.	SK Pendirian/Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2011 Tertanggal 29 - 03 – 2011
6.	No. Rekening	:	0353-01-004619-53-1 BRI.
7.	Nomor Pokok WajibPajak /NPWP	:	00.830.4529.955.00

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8. Sertiffikat Tanah -
9. Status : Satuan Pendidikan Nonformal

b. Visi dan Misi

Visi:

Peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan DIKMAS) yang merata, bermutu, berkualitas dan berkeadilan bagi pemberdayaan masyarakat.

Misi:

1) Memperulas akses pemeratan mutu PAUD dan DIKMAS dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
2) Meningkatkan daya saing pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS dalam rangka memberikan pelayanan bagi warga masyarakat.
3) Meningkatkann kualitas dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang relevan dengan tuntutan masyarakat.
4) Mewujutkan program percontohan dalam rangka penyelengaraan program PAUD dan DIKMAS.

c. Tugas dan Fungsi (TUSI) SKB Kabupaten Teluk Wondama

1) Melaksanakan program PAUD dan DIKMAS.
2) Melaksanakan pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan satuan pendidikan non formal lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Melaksanakan pendampingan bagi satuan pendidikan lain, yang menyelenggarakan program PAUD dan DIKMAS.

4) Membuat program percontohan PAUD dan DIKMAS.

5) Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program PAUD dan DIKMAS.

6) Sebagai pusat penyelenggaraan program PAUD dan DIKMAS.

7) Melaksanakan pengabdian masyarakat.

d. Program Kerja SKB Kabupaten Teluk Wondama

1) Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari;

- Satuan Taman Penitipan Anak (TPA) Usia 0-2 Tahun.
- Satuan Kelompok Bermain (KOBER) *Play Group* usia 3-4 Tahun
- Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) Usia 5-6 Tahun
- Satuan PAUD sejenis (SPS) - Sekolah mingguTaman Pengajaran Alquran.
- Posyandu.

2) Program Pendidikan Masyarakat (Dikmas), terdiri dari:

- Program pemberantasan buta aksara.
- Keaksaraan dasar (KD) dan keaksaraan usaha mandiri (KUM).
- Taman bacaan masyarakat.
- Pemberdayaan perempuan.
- Program kesetaraan - Paket A setara SD
  - Paket B setara SMP

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

- Paket C setara SMA

3) Program Kursus dan Pelatihan (*Life Skill* - Kecakapan Hidup):

- Wira Usaha Kampung:
  - Pengolahan Sagu
  - Anyam-anyaman
  - Ukiran-ukiran
  - Budidaya perikanan, dll.
- Wira Usaha Kota:
  - Kursus komputer
  - Kursus menjahit
  - Pertukangan kursus mekanik (motor, mobil)
  - Desa vokasi

4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD - DIKMAS bagi Guru PAUD, Pengawas PAUD/DIKMAS, Tutor keaksaraan.

B. Hasil

3. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Pemberantasan Buta Aksara di Distrik Rasiey yang Dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pada Bab I Pasal 1 ayat (12), pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

nonformal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya, dalam pasal 26 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Philips H. Coombs (sebagaimana dikutip dalam Sudjana, 2001:22) memiliki pandangan terdapat persamaan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan nonformal. Menurutnya, pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa

> *"Pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional".*

Konsep pendidikan nonformal yang telah diuraikan di atas, mengisyaratkan bahwa pendidikan nonformal hendaknya difokuskan pada pemberian kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang tidak lama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Implementasinya dapat dilihat dari jenis kegiatannya yang meliputi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik.

Keberadaan pendidikan nonformal sebagai subsistem pendidikan nasional, bisa berfungsi menggantikan, melengkapi maupun menambah pendidikan formal. Sebagai pengganti (*substitutif*) dimaksudkan bahwa layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggantikan program pendidikan formal, contohnya pendidikan kesetaraan meliputi program paket A setara SD/MI atau sederajat, program paket B setara SLTP/MTs atau sederajat, dan program paket C setara SMA/MA atau sederajat. Sebagai pelengkap (*complement*) artinya bahwa materi pendidikan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan melengkapi apa yang telah diperoleh pada pendidikan formal, contoh kegiatannya antara lain kursus, kelompok belajar dan sebagainya. Sebagai penambah (*suplement*), artinya bahwa materi pendidikan nonformal yang disampaikan bertujuan memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di pendidikan formal, contohnya.

Menyangkut pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, penulis

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

membaginya ke dalam aspek permasalahan: yaitu: (a) kurikulum, (b) tenaga pendidik dan peserta didik, serta (c) sarana dan prasarana.

Untuk lebih jelasnya ketiga permasalahan di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

a. Kurikulum

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia.

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.

Konsep kurikulum berkembang sesuai perkembangan teori dan praktek pendidikan, juga bervariasi menurut aliran yang dianutnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru dan dipelajari oleh siswa.

(Sutopo dkk, 1986 : 15).mengatakan bahwa"

> *"Pada perkembangan selanjutnya, kurikulum tidak dimaknai sekedar sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik, tetapi diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara-cara penilaian yang direncanakan oleh warga belajaran dan digunakan dalam pendidikan".*

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kurikulum disusun dalam rangka membantu warga belajar untuk mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosialemosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni.

Mulyasa (2006) berpendapat bahwa

> *"Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan".*

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, dijelaskan bahwa

> *"Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen-komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi dan struktur program, organisasi, dan proses*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belajar mengajar dan diakhiri dengan evaluasi dalam sebuah sistem harus bersifat harmonis, dan tidak saling bertentangan"

.

Dilihat dari posisinya dalam pendidikan, kurikulum dapat disimpulkan menempati tiga posisi, yaitu: (1) kurikulum adalah "*construct*", (2) kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan, (3) kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan.

Ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kita mengenal beberapa istilah kurikulum sebagai berikut:

1) Kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum
2) Kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan warga belajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan warga belajar dalam jangka panjang. Sedang pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan guru datang tepat waktu ketika mengajar di kelas, sebagai contoh, akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik.

Berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakan:

1) Kurikulum terpisah-pisah (*separated curriculum*), kurikulum yang mata pelajarannya dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya, mata pelajaran sejarah diberikan terpisah dengan mata pelajaran geografi, dan seterusnya.
2) Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*), kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Misalnya Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan fusi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah Sekolah Dasar. Mata pelajaran matematika, sains, bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran lain diberikan dalam satu tema tertentu.
3) Kurikulum terkorelasi (*corelated curriculum*), kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan pengembangnya dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi:

1) Kurikulum nasional (*national curriculum*), yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional.
2) Kurikulum negara bagian (*state curriculum*), yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat.
3) Kurikulum sekolah (*school curriculum*), yakni kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah lahir dari keinginan untuk melakukan diferensiasi dalam kurikulum

Sebagai perangkat penting penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Merupakan suatu alat atau jembatan untuk mencapai tujuan.
2) Bagi peserta didik, kurikulum disiapkan agar mereka mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan peserta didik guna melengkapi bekal hidupnya.
3) Bagi pendidik
   a) Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar para peserta didik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan warga belajar dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan

4) Bagi pimpinan lembaga pendidikan

a) Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar.

b) Sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut.

c) Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar.

5) Bagi orang tua peserta didik

a) Dapat mengetahui pengalaman belajar apa yang diperlukan putra/ putrinya.

b) Berpartisipasi untuk membantu membimbing putra/ putrinya dalam mencapai tujuan pendidikan (kurikulum).

6) Bagi masyarakat dan pemakai lulusan

a) Ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua/ masyarakat.

b) Ikut memberikan kritik/saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan pendidikan di lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja.

Selain fungsi-fungsi di atas kurikulum memiliki fungsi lain, yaitu:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Penyesuaian (*the adjustive of adaptive function*), yaitu kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara keseluruhan.
2) Pengintegrasian (*the integratif function*), yaitu mendidik pribadi yang terintegrasi dengan masyarakat.
3) Deferensiasi (*the defferensiating function*), yaitu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat.
4) Persiapan (*the prepaedeutic function*), yaitu mempersiapkan peserta belajar utuk dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.
5) Pemilihan (*the selective function*), yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan dimnatinya.
6) Diagnostic (*the diagnostic function*), yaitu membantu peserta belajar memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama khususnya berkaitan dengan masalah kurikulum, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal warga sehingga apa yang diajar dapat dicontohkan". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan perlu disesuaikan dengan tingkat pemahanan warga belajar". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalahmateri yang akan diajar harus terlebih dahulu dikenal oleh warga belajar sehingga bahan ajar untuk keaksaraan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah tempat tinggal warga belajar". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan harus dipadukan dengan muatan lokal di daerah tempat tinggal warga belajar". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan harus dipadukan dengan kondisi dan situasi di lingkungan masing-masing warga

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belajar". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

".... mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan menggunakan metode mengajar terstruktur, SAS (Struktur Analisis Sistem)". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

".... mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah dijabarkan dengan keadaan daerah masing-masing". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Hasil wawancara dengan Pamong Belajarpada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

".... mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah Kurikulum disesuaikan dengan situasi di lingkungan masing-masing warga belajar". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

".... mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah ditetapkan bersama warga masyarakat dan warga belajar". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga belajar". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah KTSP dan Silabus yang telah disesuaikan dengan keadaan warga belajar". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan gurudi Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah disepakati bersama tutor aksara, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal warga belajar". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan adalah disepakati dengan Tutor, warga masyarakat dan warga belajar". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama khususnya berkaitan dengan masalah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan, adalah:

1) Disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal warga sehingga apa yang diajar dapat dicontohkan.
2) Perlu disesuaikan dengan tingkat pemahanan warga belajar.
3) Harus dipadukan dengan muatan lokal di daerah tempat tinggal warga belajar.
4) Harus dipadukan dengan kondisi dan situasi di lingkungan masing-masing warga belajar.
5) Menggunakan metode mengajar terstruktur, SAS (Struktur Analisis Sistem).

Sehubungan dengan hal tersebut, Mulyasa (2006) berpendapat bahwa implementasi kurikulum adalah operasional konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, implementasi KTSP mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu:

1) Pengembangan Program

Pengembangan kurikulum mencakup pengembangan program

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tahunan, progaram semester, program modul (pokok bahasan), program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling.

2) Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran dalam KTSP adalah pembelajaran dimana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa. Sistem penyampaian dan indikator pencapaian hasil belajar dirumuskan secara tertulis sejak peencanaan dimulai. Prinsip utama dalam proses pembelajaran adalah keterlibatan seluruh pihak atau sebagian besar potensi siswa (fisik dan non fisik) dan kebermaknaan bagi diri dan kehidupannya saat ini dan di masa yang akan datang (*life skill*).

Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP mencakup tiga hal, yaitu: (a) Tahap pra-instruksional, (b) Tahap instruksional, dan (c) Tahap evaluasi dan tindak lanjut.

3) Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi hasil belajar adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar peserta didik setelah ia mengalami proses belajar selama satu periode tertentu. Evaluasi kurikulum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan dengan:

a) Penilaian kelas

Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberi nilai terhadap hasil belajar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

siswa berdasarkan tahap kemajuan siswa sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam situasi formal maupun informal, di dalam kelas maupun di luar kelas, terintegrasi dengan kegiatan belajar atau bisa pula dilakukan pada waktu tertentu.

b) Tes kemampuan dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Tes kemampuan dasar ini dilakukan pada setiap tahun.

c) Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi

Pada setiap akhir semester dan tahun pembelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja, dan hasil belajar dicantumkan dalam surat tanda tamat belajar.

d) *Benchmarking* penilaian program dan tindak lanjut

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai ideal untuk masing-masing indikator lebih dari 60%. Namun sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 60%, atau 70%. Penetapan ini disesuaikan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik dan guru serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 bahwa

> *"Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum, operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan".*

Menurut Syah (2010) dari segi implementasi KTSP ada tiga hal penting yang dapat mengukur keberhasilan siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya, yaitu: (a) Evaluasi prestasi kognitif, (b) Evaluasi prestasi afektif, dan (c) Evaluasi prestasi psikomotorik.

b. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dimana di dalamnya termasuk pendidik. Secara lebih luas tenaga kependidikan termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu sebagai berikut:

1) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang, di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji.
2) Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih.
3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidikan, seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Secara umum tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1) Tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih.
2) Tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan, dan pustakawan.
3) Tenaga teknis kependidikan, tediri atas laboran dan teknisi sumber belajar.
4) Tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah.
5) Tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan.

Tenaga kependidikan juga mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan, pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan tenaga atau sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Pimpinan satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal.
2) Penilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal.
3) Pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, satuan pendidikan dasar, dan pendidikan menegah.
4) Tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan.
5) Tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan.
6) Teknisi sumber belajar bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan.
7) Tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan nonformal.
8) Tenaga administrasi bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan.
9) Psikolog bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan psikologis-pedagogis pada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan usia dini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10) Pekerja sosial bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagosis pada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan usia dini.

11) Terapis bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis-kinesiologis pada peserta didik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.

12) Tenaga lapangan dikmas (TLD), yaitu tenaga pendidikan nonformal (PNF) yang berlatarbelakang pendidikan sarjana, berstatus sebagai tenaga kontrak yang diberi tugas membantu penilik dan berkedudukan di kecamatan.

13) Fasilitator desa binaan intensif (FDI), yaitu tenaga kontrak berpendidikan sarjana yang bertugas di pedesaan (satu sarjana eksakta dan satunya lagi non eksakta), yang bertugas memberikan layanan PNF yang merata dan berkhualitas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di desa-desa.

14) Teknisi teknologi informasi, yaitu tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian pada bidang teknologi dan informasi yang diberi tugas dan kewenangan mengelola teknologi dan informasi pada suatu lembaga penyelenggara satuan PNF.

15) Pekerja sosial kependidikan bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan PAUD.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16) Tenaga kebersihan sekolah bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang Pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama khususnya berkaitan dengan masalah tenaga pendidik dan peserta didik, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> ".... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah Sanggar Kegiatan Belajar menyurati Distrik untuk mengirim utusannya. (Calon Tutor Aksara) yang berpendidikan minimal SLTA. Setelah mereka mendapat pelatihan dan diberi sertifikat, maka mereka akan kembali ke kampung untuk mengajar masyarakat yang buta aksara". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " .... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah atas usulan dari Distrik dengan kreteria tamat SLTA". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"…. proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah atas utulan dari masing-masing distrik dengan kreteria tamat SLTA untuk mengikuti Diklat calon tutor Aksara". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" …. proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah atas usulan dari kepala kampung atau kepala Distrik masing-masing". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" …. proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah atas usulan dari masing-masing Distrik, dengan kreteria pendidikan tamat SLTA. Warga masyarakat tersebut mau mengabdi untuk tutor Aksara". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab.Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" …. proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah pendidikan SLTA atas usulan dari Kepala Distrik". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalahcalon Tutor merupakan usulan dari tiap distrik". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah diusulkan dari kepala kampung setempat". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah tiap Distrik mengirim calon tutor Aksara untuk mengikuti Diklat Pendidikan minimal SLTA". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah melalui proses seleksi dan pengamatan kepala kampung dan kemudian diusulkan kepada Sanggar Kegiatan Belajar". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah atas utusan dari tiap-tiap Distrik untuk mengikuti DIKLAT tutor aksara". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalahutusan dari tiap-tiap Distrik dengan pendidikan SLTA dan diberikan pelatihan tentang cara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengajar orang dewasa". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"..... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalahatas usulan dari tiap-tiap distrik minimal berijasah SLTA". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"..... proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah atas usulan dari tiap Distrik". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama khususnya berkaitan dengan masalah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah:

1) Sanggar Kegiatan Belajar menyurati Distrik untuk mengirim utusannya. (Calon Tutor Aksara) yang berpendidikan minimal SLTA. Setelah mereka mendapat pelatihan dan diberi sertifikat, maka mereka akan kembali ke kampung untuk mengajar masyarakat yang buta aksara.
2) Atas usulan dari Distrik dengan kriteria tamat SLTA.
3) Atas usulan dari kepala kampung atau kepala Distrik masing-masing.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Atas usulan dari masing-masing Distrik, dengan kriteria pendidikan tamat SLTA dan warga masyarakat tersebut mau mengabdi untuk tutor Aksara.

Sehubungan dengan hal tersebut, UU No.20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa :

> *"Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi".*

Dengan kata lain, dalam pengertian yang sederhana, pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sedangkan dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di lingkungan non formal dan informal.Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan peserta didik, serta bertanggung jawab untuk membentuk peserta didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang.

c. Sarana dan Prasarana

Menurut Arikunto (1987), bahwa :

> *"sarana pendidikan ialah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar mencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien".*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Prasarana pendidikan adalah alat yang tidak langsung yang digunakan untuk pencapai tujuan pendidikan. Yang termasuk prasarana misalnya ; Bangunan sekolah, lapangan olahraga, asrama guru, dan sebagainya.

Gunawan (1996) berpendapat bahwa

> "*manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (ready for use) dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar semakin efektif dan efesien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan*".

Manajemen sarana pendidikan adalah kegiatan pengelolaan atau usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan terwujud apabila terjadi suatu proses yang langkah-langkahnya tersusun rapi. Kegiatan serta proses kerja dalam manajemen sarana pendidikan meliputi:

1) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
2) Mengupayakan pengadaan atau ketersedian dan kesiapan sarana dan prasarana serta memfasilitasinya
3) Penyimpanan
4) Inventarisasi
5) Mefasilitasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan
6) Memfasilitasi pembangunan atau pengembangan dan rehabilitasi unit sekolah dan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7) Melakukan penghapusan

Lebih lanjut menurut Gunawan (1996) mengatakan bahwa

> *"jenis-jenis sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi sarana fisik dan sarana non fisik. Sarana fisik, yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, alat pelajaran, media, ruang belajar, perpustakoan, tempat bermain, toilet, sarana olahraga, tempat ibadah, kantin dan sarana-sarana lain yang diperlukan"*

Perpustakaan adalah jantung hati pendidikan yang banyak memberikan berbagai informasi kepada semua pencari ilmu, bahkan pencuri ilmu. Di samping itu perpustakaan adalah sumber ilmu pengetahuan yang dinamis karena terkumpulnya koleksi berbagai buku, bahan ajar dan peralatan pembelajaran lainnya. Saranan non fisik antara lain meliputi peraturan-peraturan, tata tertib, budaya sekolah, dan program-program yang mendukung program belajar mengajar, penciptaan lingkungan yang kondusif.

Sarana pendidikan dapat berfungsi langsung maupun berfungsi tidak langsung dalam proses pembelajaran. Sarana pendidikan yang dapat dipindahkan dan berfungsi tidak langsung dalam proses pembelajaran. Sarana pendidikan yang dipindahkan dan berfungsi tidak langsung dalam proses pembelajaran contohnya adalah meja, kursi, lemari, rak, papan tulis, perpustakaan,komputer, bola, mesin ketik, tape recorder, slide, dan sebagainya.Yang termasuk dalam sarana pendidikan yang dapat dipergunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar adalah : alat pelajaran, alat peraga dan media.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang Pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama khususnya berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai. Sanggar Kegiatan Belajar belum memiliki Kantor sendiri masih pinjam. PAUD percontohan belum didirikan jumlah tutor masih kurang". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai, gedung masih pinjam". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondamabelum memenuhi kreteria untuk memadai". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai, Kantor SKB Wondama masih pinjam dan belum memiliki ruang belajar". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai, masih banyak yang harus dibenahi". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai, masih dalam tahap pembenahan". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai, masih dalam tahap pembenahan". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum seluruhnya memadai". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama belum memadai". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama khususnya berkaitan dengan masalah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah:

1) Belum memadai. Sanggar Kegiatan Belajar belum memiliki Kantor sendiri masih pinjam. PAUD percontohan belum didirikan jumlah tutor masih kurang.
2) Belum memadai, gedung masih pinjam.
3) Belum memadai, kantor SKB Wondama masih pinjam dan belum memiliki ruang belajar.
4) Belum memadai, masih banyak yang harus dibenahi.
5) Belum memadai, masih dalam tahap pembenahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ada, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah bersangkutan.

Penentuan sarana pendidikan sekolah juga harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang memfasilitasi atau membiayai pengadaan sarana tersebut. Pihak sekolah bisa mengajukan permohonan pengadaan sarana pendidikan kepada istansi atasan seperti kepada pemerintah melalui Disdikpora provinsi, kabupaten/kota, bisa juga kepada pihak komite sekolah mengajukan RAPBS (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah) pada waktu awal tahun pelajaran atau mungkin sumbangan dari masyarakat. Apabila pengajuan pengadaan sarana pendidikan tersebut hanya sebagian yang disetujui, maka harus menentukan sekala prioritas atau sarana yang paling penting dan mendesak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk memudahkan mengetahui sarana yang paling penting dan mendesak dalam keperluan pendidikan, maka pada daftar pengadaan sarana harus diurut dari nomor terkecil untuk sarana/fasiltas yang paling penting atau mendesak kemudian diikuti sarana yang lain sesuai dengan tingkat kepentingan.

Akhir-akhir ini telah banyak teoritisi mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan perlengkapan pendidikan di sakolah, antara lain

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

adalah seorang teoritisi administrasi pendidikan, yaitu Jame J. Jones (1969). Jones menegaskan bahwa:

> *"perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah diawali dengan menganalisis jenis pengalaman pendidikan yang diberikan di sekolah itu".*

Janes mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah, sebagai berikut:

1) Menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan program untuk masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan perlengkapan yang akan datang.
2) Melakuakan survei keseluruh unit sekolah untuk menyususn master plan untuk jangka waktu tertentu.
3) Memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survei.
4) Mengembangkan educational specification untuk setiap proyek yang terpisah-pisah dalam usaha master plan.
5) Merancang setiap proyek yang terpisah-pisah sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang diusulkan.
6) Mengembangkan dan menguatkan tawaran atau kontrak dan melaksanakan sesuai dengan gambaran kerja yang diusulkan.
7) Melenkapi perlengkapan gedung dan meletakannya sehingga siap untuk digunakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama

Mengenai faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada sanggar kegiatan belajar di kabupaten teluk wondama, penulis membaginya ke dalam beberapa faktor, yaitu: (a) karakteristik lembaga, (b) kejelasan standar dan tujuan, (c) sumber daya yang diperlukan, (d) komunikasi, (e) kondisi sosial ekonomi, (f) kesediaan dan komitmen dari pelaksana.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai faktor-faktor tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut.

a. Karakteristik Lembaga

Pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal berlandaskan pada asas kebutuhan, asas relevansi dengan pembangunan, dan asas wawasan ke masa depan. Asas kebutuhan mengandung makna bahwa penyusunan program pendidikan nonformal harus mempertimbangkan kebutuhan belajar masyarakat yang menjadi sasaran. Operasionalisasi pendidikan nonformal sangat memerlukan dukungan dari peserta didik, oleh karenanya program-program PNF disusun berdasarkan kebutuhan mereka dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Pemenuhan kebutuhan ini pun sekaligus dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik akan tanggap dan berpartisipasi aktif dalam program pendidikan andaikata program itu berorientasi pada upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Asas relevansi dengan pembangunan, artinya bahwa kehadiran pendidikan nonformal harus didasarkan atas kebutuhan pembangunan masyarakat atau daerah/wilayah. Program-program pendidikan nonformal berfungsi menggarap pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan masyarakat dan sekaligus menerima dampak dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan nonformal dapat berperan dalam tiga hal, yaitu:

1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya mereka dalam membebaskan diri dari kebodohan, dari imbalan atau upah yang rendah, dan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, dan perjuangan untuk memperoleh keadilan. Proses penyadaran ini bisa ditempuh melalui pendidikan keaksaraan, latihan ketrampilan fungsional untuk meningkatkan pendapatan, penyuluhan, atau bimbingan.
2) Membantu masyarakat untuk terbiasa hidup berorganisasi sehingga secara bersama mereka dapat mempelajari kehidupannya serta menjajagi berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, lapangan usaha, dan kemudahan yang dapat diperoleh seperti pemberian kredit modal, bahan baku dan alat yang dibutuhkan, serta pemasaran dan informasi yang diperlukan.
3) Para pendidik dan tutor pendidikan luar sekolah bekerjasama dengan masyarakat/organisasi masyarakat dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan serta

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mendayagunakan prasarana sosial, politik dan lingkungan masyarakat untuk membantu masyarakat agar mereka dapat memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan taraf hidup.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah karakteristik lembaga, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey, karena di samping SKB melaksanakan program AKSARA, SKB juga melaksanakan peningkatan mutu bagi Bunda-bunda PAUD se Kabupaten Teluk Wondama". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey berdasarkan SKB – TW berdiri tahun 2011 sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan, pada tahun 2016 berubah menjadi satuan pendidikan Nonformal". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondamasudah dikenal, karena Sanggar Kegiatan Belajar bersentuhan langsung dengan masyarakat". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat terutama di Distrik Rasiey". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey, bahwa Sanggar Kegiatan Belajar Teluk wondama berdiri tahun 2011 sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Teluk Wondama. dengan SK Bupati TW Nomor 11 Tahun 2016 berubah menjadi satuan pendidikan Nonformal dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 18 tehun 2016". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey berdasarkan Peraturan Bupati Teluh Wondama Nomer 18 tahun 2016. tentang alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rasiei Kabupaten Teluk Wondama". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah karakteristik lembaga adalah bahwa keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey, bahwa Sanggar Kegiatan Belajar Teluk wondama berdiri tahun 2011 sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Teluk Wondama. dengan SK Bupati TW Nomor 11 Tahun 2016 berubah menjadi satuan pendidikan Nonformal dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 18 tehun 2016.

b. Kejelasan Standar dan Tujuan

Kejelasan standar dan tujuan pada kegiatan pembelajaran pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, meliputi antara lain: mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan, pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan, dan tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah kejelasan standar dan tujuan, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama disesuaikan dengan potensi yang telah dimiliki atau pekerjaan yang sedang dijalani sehingga lebih mudah dalam penyampaian bahan ajar". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah mulai dari mengenal huruf dan angka sampai pada membaca mama-nama benda yang ada di sekitar". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah disesuaikan dengan keadaan di tempat warga belajar". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan PerempuanKabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama disesuaikau dengan potensi daerah Warga Aksara". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama disesuaikan dengan keadaan warga belajar". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah disepakati agar warga belajar lebih cepat mengerti". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

".... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah disesuaikan dengan kemampuan tutor dan keadaan di sekitar warga belajar". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga dan lingkungannya". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

".... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah (1) Kepala SKB, (2) Kepala Tata Usaha, dan (3) Kelompok Fungsional". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

".... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah mengacu pada KTSP dengan memperhatikankondisi lingkungan kemudian disepakati bersama". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalahdengan mengacu pada KTSP disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing kelompok belajar aksara". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalahdisepakati bersama antara warga belajar, tokoh masyarakat, dan tutor Aksara". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah disusun dengan tutor tomas, toga dan warga belajar". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan adalah bahwa mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama disesuaikan dengan potensi yang telah dimiliki atau pekerjaan yang sedang dijalani sehingga lebih mudah dalam penyampaian bahan ajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah kegiatan belajar dilaksanakan dengan sistem kelompok yang tiap kelompoknya berjumlah 10 (sepuluh) orang". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah kelompok belajar terdiri dari 10 orang, usia berkisar dari 12 tahun sampai 59 tahun". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh SanggarKegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah tiap kelompok terdiri dari 10 orang warga belajar dibimbing oleh satu orang Tutor". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah bahwa kelompok belajar terdiri dari 10 orang, usia

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berkisar dari 12 tahun sampai 59 tahun dibimbing oleh satu orang Tutor.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah agar warga masyarakat terbebas dari buta huruf". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sesuai Undang Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah Baca, Tulis. Hitung". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalahagar warga terbebas dari Aksara". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah agar warga masyarakat terbebas dari buta huruf dan hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Sumber Daya yang Diperlukan

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dan menentukan dalam pelaksanaan program keaksaraan.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah sumber daya yang dibutuhkan, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia yang dapat memberi dukungan pada warga belajar agar mereka cepat terbebas dari buta aksara". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia yang mau peduli dengan program Keaksaraan". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"....sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama yang utama adalah Sumber Daya Manusia. baik para Tutor maupun warga belajarnya". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia yang terampil". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia, baik tutor maupun warga belajarnya, sehingga berjalan dengan baik". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah SDM yang akan dijadikan Tutor dengan SDA yang akan dijadikan bahan ajar". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2017).

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia yang akan menjadi tutor dan para warga aksara". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusiaagar warga masyakat Rasiei terbebas dari aksara". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"…. sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia yang peduli dengan aksara". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah manusiabaik tutor maupun warga aksara". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. sumber daya yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah sumber daya manusia yang peduli dengan pendidikan non formal". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang terampil dan yang mau peduli dengan program Keaksaraan, yang dapat memberi dukungan pada warga belajar agar mereka cepat terbebas dari buta aksara.

d. Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan salah satu faktor yang turut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama. Dengan komunikasi yang baik antara pelaksana program, masyarakat dan pemerintah terkait memungkinkan program bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan program yang sudah dicanangkan akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah komunikasi, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey berlangsung dengan sangat baik sehingga. warga belajar dapat mengikuti dengan antusias". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah komunikasi berjalan baik antara warga belajar, tutor, dan SKB". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat akrab baik para tutor maupun dengan warga belajar". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah komunikasi berjalan dengan sangat baik antara SKB, Tutor dan Warga Belajar". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat baik". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat baik". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"…. komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat baik". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat baik". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat baik". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah SDM didukung oleh sumberdaya alam". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"…. komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah baik". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah baik". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat baik". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah sangat baik". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah komunikasi adalah komunikasi berjalan dengan sangat baik antara SKB, Tutor dan Warga Belajar.

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi juga dipandang turut berpengaruh dalam dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama. Dengan kondisi ekonomi yang memadai memungkinkan seseorang untuk melakukan sejumlah aktivitas, termasuk masalah layanan pendidikan.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah kondisi sosial ekonomi, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama rata-rata menengah ke bawah". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kahupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata ekonomi menengah ke bawah". (Dolfina

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

" ... kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata ekonomi menengah ke bawah". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah masih di bawah kehidupan standar". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah menengah ke bawah". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

"....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata menengah ke bawah". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama adalah rata-rata berada di bawah garis kemiskinan". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey adalah rata-rata ekonomi menengah ke bawah.

f. Kesediaan dan Komitmen dari Pelaksana

Demi terlaksananya suatu program kegiatan termasuk pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama dibutuhkan adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana program tersebut. Oleh karena itu, kesediaan dan komitmen dari pelaksana program harus dihadirkan dalam diri mereka guna pencapaian program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya warga belajar.

Untuk mengolah lebih jauh informasi tentang faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan masalah kesediaan dan komitmen dari pelaksana, penulis melakukan sejumlah wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi dan penjelasan, di antaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

> " ... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik, karena masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki di kemudian hari". (La Pada La Anagunung, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, wawancara oleh penulis, 4 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bapeda Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Palino Piter Lambe, S.Sos, Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 6 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kahupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Dolfina Karubuy, S.Sos., Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 8 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik, karena pamong belajar membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan tempat tinggal warga belajar". (Juliana Mirino, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 11 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik, karena masih mengadopsi dari daerah terdekat". (Edy Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis,13 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> " ... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik, sebagian masih adopsi dari kabupaten terdekat". (Jonatan Sembiring, Kabid Pendidikan Nonformal Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 15 September 2017).

Hasil wawancara dengan Staf Ahli Bidang SDM Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik, masih mengadopsi dari daerah lain kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan warga aksara". (Dra. Hermin Sesa Rinding, Staf Ahli Bidang SDM Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 18 September 2017).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil wawancara dengan Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> "....semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik, karena semua tutor keaksaraan sudah dilatih untuk menyusun program pembelajaran". (Rizel, Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 20 September 2017).

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Aleksander Yoteni, Kepala Distrik Wondiboy Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 22 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Aksara Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Martinus Korwam, Ketua Forum Aksara Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 25 September 2017).

Hasil wawancara dengan Ketua HIMPAUDNI Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Amos Wihawari, S.Sos., Ketua HIMPAUDNI Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 26 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan guru di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Julius Carlos Indubri, pensiunan guru di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 27 September 2017).

Hasil wawancara dengan pensiunan PNS di Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Marthen Yoteni, pensiunan PNS di Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 28 September 2017).

Hasil wawancara dengan warga belajar aksara padaSanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, adalah sebagai berikut:

> ".... belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik". (Aser Sayori, warga belajar aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Teluk Wondama, wawancara oleh penulis, 29 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya berkaitan dengan kesediaan dan komitmen dari pelaksana, adalah bahwa belum semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dapat disusun dengan baik, karena pamong belajar membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan tempat tinggal warga belajar, dan masih mengadopsi dari kabupaten terdekat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Pembahasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pada Bab I Pasal 1 ayat (12), pendidikan nonformal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya, dalam pasal 26 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Philips H. Coombs (sebagaimana dikutip dalam Djudju Sudjana, 2001: 22) mengatakan bahwa

> *"memiliki pandangan terdapat persamaan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan nonformal. Menurutnya, pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya".*

Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (2) menegaskan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

> *"Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional"* (Depdiknas, 2003).

Pendataan PNFyang selama ini dikelola dan dijaring oleh PSP, Balitbang, Kemdiknas kalaitu terdiri dari enam jenis, yaitu: 1) Pendidikan Keaksaraan; 2)Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 3)Pendidikan Kesetaraan yangmencakup Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA; 4)Pendidikan Berkelanjutan yang mencakup Kursus, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), dan Kelompok Belajar Usaha (KBU); 5)Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan 6)Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Salah satu program penting dalam pendidikan keaksaraan, yaitu pemberantasan buta aksara yang juga merupakan salah satu prioritas Kemdiknas. Pendidikan keaksaraan diperlukan karena keterkaitanya yang sangat erat dengan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan suatu bangsa. Seperti dijelaskan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 menggunakan salah satu indikatornya, yaitu Angka Melek Huru fusia 15 tahun keatas (AMH). Selain itu, dapat dikatakan bahwa semakin banyak penderita buta aksara disuatu negara semakin

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

miskin pula negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil penderita buta aksara semakin maju pula suatu negara.

Konsep pendidikan nonformal yang telah diuraikan di atas, mengisyaratkan bahwa pendidikan nonformal hendaknya difokuskan pada pemberian kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang tidak lama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Implementasinya dapat dilihat dari jenis kegiatannya yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik.

Keberadaan pendidikan nonformal sebagai subsistem pendidikan nasional, bisa berfungsi menggantikan, melengkapi maupun menambah pendidikan formal. Sebagai pengganti (*substitutif*) dimaksudkan bahwa layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggantikan program pendidikan formal, contohnya pendidikan kesetaraan meliputi program paket A setara SD/MI atau sederajat, program paket B setara SLTP/MTs atau sederajat, dan program paket C setara SMA/MA atau sederajat. Sebagai pelengkap (*complement*) artinya bahwa materi pendidikan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan melengkapi apa yang telah diperoleh pada pendidikan formal, contoh kegiatannya antara lain kursus, kelompok belajar dan sebagainya. Sebagai penambah (*suplement*), artinya bahwa materi pendidikan nonformal yang disampaikan bertujuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di pendidikan formal, contohnya bimbingan belajar, sanggar belajar, dan sebagainya.

Pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal berlandaskan pada asas kebutuhan, asas relevansi dengan pembangunan, dan asas wawasan ke masa depan. Asas kebutuhan mengandung makna bahwa penyusunan program pendidikan nonformal harus mempertimbangkan kebutuhan belajar masyarakat yang menjadi sasaran. Operasionalisasi pendidikan nonformal sangat memerlukan dukungan dari peserta didik, oleh karenanya program - program PNF disusun berdasarkan kebutuhan mereka dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Pemenuhan kebutuhan ini pun sekaligus dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik akan tanggap dan berpartisipasi aktif dalam program pendidikan andaikata program itu berorientasi pada upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Asas relevansi dengan pembangunan artinya bahwa kehadiran pendidikan nonformal harus didasarkan atas kebutuhan pembangunan masyarakat atau daerah/wilayah. Program--program pendidikan nonformal berfungsi menggarap pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan masyarakat dan sekaligus menerima dampak dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan nonformal dapat berperan dalam tiga hal, yaitu;

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya mereka dalam membebaskan diri dari kebodohan, dari imbalan atau upah yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

rendah, dan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, dan perjuangan untuk memperoleh keadilan. Proses penyadaran ini bisa ditempuh melalui pendidikan keaksaraan, latihan ketrampilan fungsional untuk meningkatkan pendapatan, penyuluhan, atau bimbingan.

2. Membantu masyarakat untuk terbiasa hidup berorganisasi sehingga secara bersama mereka dapat mempelajari kehidupannya serta menjajagi berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, lapangan usaha, dan kemudahan yang dapat diperoleh seperti pemberian kredit modal, bahan baku dan alat yang dibutuhkan, serta pemasaran dan informasi yang diperlukan.
3. Para pendidik dan tutor pendidikan luar sekolah bekerjasama dengan masyarakat/organisasi masyarakat dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan serta mendayagunakan prasarana sosial, politik dan lingkungan masyarakat untuk membantu masyarakat agar mereka dapat memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan taraf hidup.

Asas relevansi dengan pembangunan artinya bahwa kehadiran pendidikan nonformal harus didasarkan atas kebutuhan pembangunan masyarakat atau daerah/wilayah. Program–program pendidikan nonformal berfungsi menggarap pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan masyarakat dan sekaligus menerima dampak dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan nonformal dapat berperan dalam tiga hal, yaitu;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya mereka dalam membebaskan diri dari kebodohan, dari imbalan atau upah yang rendah, dan adanya ketidakadilan dalam masyarakat, dan perjuangan untuk memperoleh keadilan. Proses penyadaran ini bisa ditempuh melalui pendidikan keaksaraan, latihan ketrampilan fungsional untuk meningkatkan pendapatan, penyuluhan atau bimbingan.
2. Membantu masyarakat untuk terbiasa hidup berorganisasi sehingga secara bersama mereka dapat mempelajari kehidupannya serta menjajagi berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, lapangan usaha, dan kemudahan yang dapat diperoleh seperti pemberian kredit modal, bahan baku dan alat yang dibutuhkan, serta pemasaran dan informasi yang diperlukan.
3. Para pendidik dan tutor pendidikan luar sekolah bekerjasama dengan masyarakat/organisasi masyarakat dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan serta mendayagunakan prasarana sosial, politik dan lingkungan masyarakat untuk membantu masyarakat agar mereka dapat memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan taraf hidup.

Program PAUD membatasi pada anak usia antara 0 sampai 6 tahun dan merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak serta pengembangan intelegensi permanen untuk menyerap informasi. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasamani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. PAUD terdiri dari Taman Penitipan Anak(TPA), Kelompok Bermain(KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi isi, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatihkan kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha mandiri. Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran (*deliverysystem*) dirancang sedemikian rupa agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komperehensif dan kompetitif yang berguna dalam peningkatan kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif dan konstruktif. Pendidikan kesetaraan terdiri dari Paket A setara SD, Paket B

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

setara SMP dan Paket C setara SMA. Paket A dan Paket B dirancang untuk menunjang suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (WajarDikdas) dengan prioritas anak usia Wajar Dikdas (7-15 tahun). Paket A dan Paket B memberi kesempatan bagi orang dewasa yang belum memiliki pendidikan setara pendidikan dasar 9tahun. Paket C setara SMA dirancang untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang belum memiliki pendidikan setara SMA. Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum SMA jurusan IPS.Bahan belajar disusun dalam bentuk modul, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar mandiri.

Pendidikan berkelanjutan ada tiga program, yaitu Kursus, PKH, dan KBU. Kursus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Kursus memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan sumber daya yang terampil dan profesional. PKH adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan.Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersankutan mampu, sanggup dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya dimasa datang. Kecakapan hidup mencakup kecakapan dasar dan kecakapan instrumental. KBU adalah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

program pembelajaran yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk belajar, bekerja dan berusaha, sebagai pelajaran pascaprogram KF, paket B dan paket C. Tujuan KBU, yaitu untuk memperluas kesempatan belajar usaha bagi masyarakat yang tidak mampu, agar memiliki penghasilan yang tetap, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) lahir dari satu kesadaran bahwa lembaga persekolahan membuat banyak orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Untuk itu, PKBM diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat pusaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, sebagai sumber informasi yang andal bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional, dan sebagai tempat tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di antara warga masyarakat. Sebagai salah satu institusi PNF atau pendidikan masyarakat dan wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, PKBM bersifat fleksibel dan netral. PKBM disebut fleksibel, karena ada peluang bagi masyarakat untuk belajar apapun sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di PKBM, warga masyarakat di bawah bimbingan tutor dapat secara demokratis merancang kebutuhan belajar yang mereka inginkan. Dalam PKBM dapat diselenggarakan beberapa program pembelajaran yang beraneka ragam, seperti program KBU, pendidikan keaksaraan, Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, kursus menjahit, kursus merias pengantin, kursus las, atau program

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keterampilan lainnya.

PKBM bersifat netral, karena tidak menggunakan atribut pendidikan masyarakat (Dikmas) atau pemerintah. Oleh karena itu, semua lembaga/ instansi pemerintah atau swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pihak-pihak lain dapat memanfaatkan keberadaan PKBM sepanjang untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Misalnya, ada PKBM yang disclenggarakan oleh LSM, Pondnk pesantren, ataulembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, serta yang diprakarsai oleh perusahaan. Dalam hal ini, Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dit Dikmas) berperan memfasilitasi, sedangkan prakarsa ada pada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan sumber DitDikmas, membaca sebenarnya merupakan proses belajar, sehingga masyarakat yang gemar membaca (*reading society*) akan melahirkan masyarakat belajar (*learningsociety*) yang cerdas. Pengembangan budaya baca dilakukan dengan berbagai cara,di antaranya melalui perintisan dan penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) didesa-desa; pemberian *blockgrant* ke TBM untuk membeli buku-buku koleksi baru,pelatihan pengelolaanTBM dan perpustakaan desa; diskusi-diskusi yang bersumber dari buku-buku di TBM, dan sebagainya. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, memang sudah sepatutnya ditindaklanjuti dengan kampanye gerakan membaca, khususnya di kalangan masyarakat lapisbawah. Membangun masyarakat gemar membaca merupakan bagian dari upaya menuju

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan nonformal. Membangun budaya baca melalui TBM merupakan program yang sangat strategis. Prioritas sasaran pengguna TBM,yaitu warga belajar dari program-program pendidikan keaksaraan (pemberantasan buta aksara), program pendidikan kesetaraan (program Paket Asetara SD,program Paket B setara SMP, dan program Paket C setara SMA).

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan program pembelajaran dengan bentuk dan satuan yang diarahkan pada makna kesejatian belajar. Maksudnya, fokus materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuban pesertadidik guna menunjang hidup dan penghidupannya. Program peningkatan budaya baca oleb Direktorat Pendidikan Masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: 1)Terbentuknya TBM diseluruh pelosok daerab; 2)Bahan bacaan yang sesuai kondisi objektif masyarakat; dan3)Tumbuhnya minat baca masyarakat (Kemdiknas, 2010c).

Dengan demikian, ke depan diharapkan program pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama semakin meningkat dan target yang telah ditetapkan oleh SKB dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahwa masyarakat Kabupaten Teluk Wondama akan terbebas dari buta aksara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama, meliputi: kurikulum, tenaga pendidikan dan peserta didik, serta sarana dan prasarana.
2. Faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama adalah karakteristik lembaga, kejelasan standar dan tujuan, sumder daya yang diperlukan, komunikasi, kondisi sosial ekonomi, kesediaan dan komitmen dari pelaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan eh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama semakin meningkat dari waktu ke waktu dan untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak terutama dukungan dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan senantiasa memperhatikan masalah-masalah seperti kurikulum, tenaga pendidikan dan peserta didik, serta sarana dan prasarana.

2. Dengan mengetahui faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Teluk Wondama, maka Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama hendaknya juga senantiasa memperhatikan faktor-faktor tersebut agar program keaksaraan ini bisa berkembang dan berjalan secara berkesinambungan demi tercapainya cita-cita warga masyarakat Kabupaten Teluk Wondama akan terbebas dari buta aksara.
3. Kepada peneliti yang berminat dan tertarik untuk meneliti bidang kajian seperti ini hendaknya dapat mengkaji lebih mendalam dengan menambah variabel di dalamnya yang belum sempat diteliti dalam penelitian ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, D. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ali, M. (2007). Berantas buta aksara lewat tutorial terpadu. Semarang. Diambil 25 Mei 2017, dari situs http://www.suaramerdeka.com.

Anonim. (2009). Pemberantasan buta aksara mesti diarahkan. Diambil 1 Juni 2017, dari situs http://www.indonesia.go.id.

Dirjen Dikti. (2003). *Pokok-pokok pikiran tentang pendidikan guru dalam jabatan guru di Indonesia. Pendidikan, pelatihan dan perjuangannya sejak zaman kolonial hingga era revormasi*. Supriadi (ed.) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan.

Danim, S. (2010). *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.

Danu, W. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Presindo Persada.

Faisal, Sanapiah, (tt). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Fakhrurozi, J. (2009). *Buta aksara dan kesejahteraan rakyat*. Diambil 20 Mei 2017, dari situs http://www.index.com.

Fikri, S. (2010). Buta aksara empat lawang tinggi. Diambil 28 Mei 2017, dari situs http://www.syamsul's.wordpress.com.

Fitriani, A. (2007). *Implementsi Kebijakan*. Jakarta:

Hartono, R. (2010). *Apa kabar program pemberantasan buta aksara?* Diambil 1 Juni 2017, dari situs http:www.kompas.com.

Islamy. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

James, E A. (t.t). *Kebijakan sebagai Prilaku*. Jakarta: PT. Grapindo Persada.

Jumini. (2009). Pemberantasan buta aksara melalui KKN tematik. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Jurnal. (2013). Aksara Seriti BPPAUDNI. Edisi 11. Regional V Mataram.

Krismartini, (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKIS.

Mayo, M. (1998). "Community Work", dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), *Social Work: Themes, Issues and Critical Debates*. London: McMillan.

Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Nasution, S. (1983). *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Jemmars.

Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner dan Steven L. McMurtr y (2004). *Social Work Macro Practice* (third edition). Boston: Allyn and Bacon.

Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Payne, M. (1995). *Social Work and Community Care*. London: McMillan.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Soelaiman, J. S. (1981). *Pendidikan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sudjana, S.F. D. (1983). *Pendidikan Nonformal (Wawasan-Sejarah-Azas)*.Bandung: Theme.

Sugiyono.(1997). *Metode Penelitian Administrasi.Edisi ke 4*. Bandung: CV. Alfabetha.

----------. (2001). *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keduabelas, Bandung: Alfabeta.

----------. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

----------. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----------. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sulistyarini, (2016). *Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Program Magister (TAPM)*. Cetakan Keempat. Jakarta: Universitas Terbuka.

Supardi. (2003). *Pengembangan Tenaga Kependidikan dalam Guru Indonesia*.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Supriadi, D. (2003). *Guru di Indonesa. Pendidikan, Pelatihan dan Perjungannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependiddikan.

Suwandi, Y. (2007). *Pemberantasan buta aksara.* Semarang. Diambil 25 Mei 2017, dari situs http://www.myblog.wordpress.com.

Syam, M.N. (1980). *Pengantar Dasar-dasar Kepedidikan.* Surabaya: Usaha Nasional.

Swisma. (2010). *Tingkatkan pemberantasan buta aksara - pejabat jangan bohongi publik.* Diambil 1 Juni 2017, dari situs :http://www.global.com.

Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards.* Yogyakarta: Lukan of set.

Tilaar, H.A.R (1997) *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi.* Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo.

Tirtarahardja, U. (2005). *Pengantar Pendidikan.* Jakarta: Raneka Cipta.

Twelvetrees, A. (1991). *Community Work.* London: McMillan.

Undang-Undang Nomer 20 tabun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional.*

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wahab, S. A. (2000). *Studi Implementasi Kebijaksanaan.* Yogyakarta: Laporan Penelitian pada Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM.

----------. (2002). *Analisis Kebijakan Publik.*

----------. (2004). *Analisis Kebijaksanaan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, A. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, A. (2012). *Analisis Kebijakan dan Formasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: PT. Gramedia Persada.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wibawa, S. (2000). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

---------- . (1972). *Implementasi Pendidikan Nonformal di Beberapa Negara*. Wikipedia.com.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1.

Daftar Pertanyaan Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : .....
2. Nama Lengkap : .....
3. Jenis kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Tempat/Tanggal Lahir : .....
6. Pendidikan/Jurusan : .....
7. Alamat Rumah : .....
8. Pekerjaan/Jabatan : .....
9. Pangkat/Golongan : .....
10. Telp/Hp : .....

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   .....
   .....
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   .....
   .....
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   .....
   .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!

   .....

   .....

5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?

   .....

   .....

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

   .....

   .....

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

   .....

   .....

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

   .....

   .....

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

   .....

   .....

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

    .....

    .....

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?

    .....

    .....

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?

    .....

    .....

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?

    .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

.....

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
.....
.....

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
.....
.....

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
.....
.....

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
.....
.....

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
.....
.....

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
.....
.....

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
.....
.....

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
.....
.....

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

.....

.....

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?

.....

.....

24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

.....

.....

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

.....

.....

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?

.....

.....

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?

.....

.....

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?

.....

.....

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?

.....

.....

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?

.....

.....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?

    .....

    .....

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

    .....

    .....

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?

    .....

    .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.1

TRANSKRIPT WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 01
2. Nama Lengkap : **La Pada La Anagunung**
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir: Gunung Api Utara 23 Nov 1963
6. Pendidikan/Jurusan : S2 - Megister Managemen Pendidikan
7. Alamat Rumah : Miey - Wasior
8. Pekerjaan/Jabatan : PNS / Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
9. Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
10. Telp/Hp : 0852 8186 6031

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPT WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Buta Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal warga sehingga apa yang di ajar dapat dicontohkan.

2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Bagaimana usaha para tutor dalam mengajar sehingga apa yang di ajarkan dapat dengan cepat di mengerti oleh warga aksara sehingga mereka lebih cepat terbebas dari aksara.

3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Cara Belajar Siswa Aktif, KTSP, Cepat Tuntas Aksara.

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   KTSP, Struktur Analisis Sistem.

5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:
Mendengarkan, Membaca, Menulis dan Berhitung.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Sanggar Kegiatan Belajar menyurati Distrik untuk mengirim utusannya. (Calon Tutor Aksara) yang berpendidikan minimal SLTA. Setelah mereka mendapat pelatihan dan diberi sertifikat, maka mereka akan kembali ke kampung untuk mengajar masyarakat yang buta aksara.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Warga yang berusia 15 - 59 tahun yang belum bisa CALISTUNG.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Tingkat pendidikan para pengelola masih belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Sebanyak 60 orang yang tersebar di 13 distrik dan 76 kampung.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Sebanyak 600 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:
    Belum Sanggar Kegiatan Belajar belum memiliki Kantor sendiri masih pinjam. PAUD percontohan belum didirikan jumlah tutor masih kurang.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:
    Belum karena masih banyak yang harus dilengkapi, seperti para pamong yang ada belum mendapatkan diklat pamong.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Sudah. Karena di samping SKB melaksanakan program AKSARA, SKB juga melaksanakan peningkatan mutu bagi Bunda-bunda PAUD se Kabupaten Teluk Wondama.

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
Jawaban:
Sudah sesuai dengan PERBUP Nomor 18 Tahun 2016.

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
Jawaban:
SKB didirikan pada tahun 2011 dengan Perbup No. 05 sebagai Unit Pelayan Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama. kemudian pada tahun 2016, perubahan status SKB dari Unit Pelayanan Teknis Dinas berubah menjadi Satuan Pendidikan Rasiey Kabupaten Teluk Wondama dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama No. 18 Tahun 2016.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama? *Jawaban:*
SK Kepala SKB. SK Pamong

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
   I. *KEPALA SATUAN PNF SKB*
   II. *URUSAN TATA USAHA*
   III. *KELOMOK JABATAN FUNGSIONAL (PAMONG BELAJAR)*

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:
Penetapan bahan ajar disesuaikan dengan potensi yang telah dimiliki atau pekerjaan yang sedang dijalani sehingga lebih mudah dalam penyampaian bahan ajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Kegiatan belajar dilaksanakan dengan sistem kelompok yang tiap kelompoknya berjumlah 10 (sepuluh) orang.
20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Tujuannya adalah agar warga masyarakat terbebas dari buta huruf.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Yang sangat dibutuhkan dalam pemberantasan Aksara ini adalah sumber daya manusia yang dapat memberi dukungan pada warga belajar agar mereka cepat terbebas dari buta aksara.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Komunikasi berlangsung dengan sangat baik sehingga. warga belajar dapat mengikuti dengan antosias.

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Sudah dikenal, karena Sanggar Kegiatan Belajar juga memberi DIKLAT bagi Bunda-bunda PAUD, Tutor aksara yang ada di tiap-tiap Distrik.

24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Respon masyarakat sangat baik, karena sejak berdirinya SKB baru ada yang mau memperhatikan warga yang buta huruf.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Kondisi sosial ekonomi warga belajar rata-rata menengah ke bawah.

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban:
Terutama warga aksara yang telah lanjut usia merasa malu untuk belajar, mereka berpendapat untuk apa kita belajar karana sudah tua sebentar lagi kita mati.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban:
Belum karena masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperhaiki di kemudian hari.

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Keterlibatan masyarakat sangat mendukung dalam pemberantasan buta aksara sehingga mempermudah tutor dalam mengajar.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Sangat baik karena jika warga telah bebas dari aksara maka mereka dapat dengan mudah membaca pesan singkat SMS.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Masyarakat sangat senang dengan dilaksanakannya Program Keaksaraan.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Pengawasan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan, tokoh agama. masyarakat, pemuda dan seluruh masyarakat di kampung tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Pada tahun 2020 seluruh warga masyarakat Teluk Wondama terbebas dari aksara atau melek huruf.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
Jawaban:
Setelah mereka terbebas dari Aksara. mereka memperoleh keterampilan praktis sehingga mereka dapat bekerja berwirausaha dengan keterampilan yang dimiliki.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.2

TRANSKRIPT WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 02
2. Nama Lengkap : **Palino Piter Lambe,S.Sos**
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Kristen Protestan
5. Tempat/Tanggal Lahir: Toraja. 23 Agustus 1968
6. Pendidikan/Jurusan : S-1
7. Alamat Rumah : Perum Pemda Wasior
8. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bapeda Kab Teluk Wondama
9. Pangkat/Golongan : IV
10. Telp/Hp :

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPT WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungs iuntuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Buta Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daflar pertanyaa nwawancara untuk menjawab Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

1. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan perlu di sesuaikan dengan tingkat pemahanan warga belajar.

2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Memperkenalkan nama-nama benda yang ada di sekitarnya kemudian menulis nama benda tersebut.

3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menggunakan metoda Struktur Analisis Sistem (SAS) yang diseuaikan dengan potensi lokal.

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   Gambar buah pinang tulisan INI BUAH PINANG

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban:
   Warga belajar telah dapat Calistung.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Atas usulan dari Distrik dengan kreteria tamat SLTA.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Distrik menunjuk calon tutor aksara yang akan mengikuti Diklat bagi tutor yang akan mengajar di desanya masing-masing dengan kreteria tamat SLTA.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Minimal tamat SLTA.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Sebanyak 80 orang yang tersebar di 13 Distrik 76 kampung.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Sebanyak 600 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:
    Belum memadai. gedung masih pinjam.

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Kursi , meja, Kep SKB, Sekretaris, empat Pamong dan dua Staf.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban: Ya.

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah
Jawaban: Ya.

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama! *Jawaban:*
SKB – TW berdiri tahun 2011 sebagai Unit Pelayanan Tehnis Dinas Pendidikan, pada tahun 2016 berubah menjadi satuan pendidikan Nonformal.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Kepala SKB, Pamomg Belajar dari setiap perwakilan.

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Terlampir

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:
Bahan pelajaran dari mengenal huruf dan angka sampai pada membaca mama-nama benda yang ada di sekitar.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Kelompok belajar terdiri dari 10 orang, usia berkisar dari 12 tahun sampai 59 tahun.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Sesuai Undang Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya adalah Baca, Tulis. Hitung.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wondama?
Jawaban:
Sumber daya manusia yang mau peduli dengan program Keaksaraan.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Komunikasi berjalan baik antara warga belajar,tutor, dan SKB.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Sudah sangat dikenal terutama aparat Distrik.
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Kondisi sosial ekonomi rata-rata menengah ke bawah.
26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban:
Geografis.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban: Belum.
28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
-Masyarakat sangat antusias terutama yang berusia di bawah 50 tahun.
-Seperti aktif jika ada kegiatan SKB, namun pada akhirnya belum mampu memberikon hasil yang diharapkan.
29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:
-Baik.
-Masyarakat sangat berpartisipasi terhadap Program Aksara yang dilaksanakan oleh SKB.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
-Baik.
-Ada yang acuh tak acuh ada pula yang dengan serius mengikuti.
31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
-Pengawasan berlangsung dengan baik.
-Belum maksimal selalu menunggu intruksi dari SKB.
32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
-Di setiap tahunnya 1000 warga telah terbebas dari Aksara.
-Memberantas buta aksara dan memajukan desa vokasi.
33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
Jawaban:
-Bagi warga aksara yang sudah terbebas diharapkan mendapat bimbingan berwirausaha berupa keterampilan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.
-Bisa mengembangkan pikiran ke arah yang lebih baik lagi melalui bacaan berita apa saja yang ditemui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasResponden

1.	Kode Responden	:	03
2.	Nama Lengkap	:	**Dolfina Karubuy,S.Sos.**
3.	Jeniskelamin	:	Perempuan
4.	Agama	:	Kristen Protestan
5.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Wasior, 21 Agustus 1968
6.	Pendidikan/Jurusan	:	S1 Sosial
7.	AlamatRumah	:	Perum pemda Mangguarai
8.	Pekerjaan/Jabatan Perempuan	:	Kepala Badan Pemberdayaan
9.	Pangkat/Golongan	:	IV/c
10.	Telp/Hp	:	0852248870009

B. PetunjukPengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, September 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Buta Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakanpen didikan nonformal dalam pemberantasan tuna aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah factordeterminan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan tuna aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. BagaimanakahmekanismepenetapanKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Materi yang akan diajar harus terlebih dahulu dikenal oleh warga belajar sehingga bahan ajar untuk keaksaraan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah tempat tinggal warga belajar.

2. Apa saj aprinsip – prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Pada prinsipnya warga tersebut telah terbebas dari aksara ini semua tergantung dari keaktifan siswa dan kelihaian tutor dalam menyampaikan materi.

3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang disesuaikan dengan bahan ajar lokal.

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran yang telah disesuaikan dengan keadaan setempat contoh. Warga belajar yang tinggal di pegunungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tutor dalam mengajar memperlihatkan gambar pohon pepaya di baca Pe – pa – ya.

5. Apasaja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban:
   Warga dapat baca , tulis , hitung dan berbahasa indonesia.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Atas ututan dari masing-masing distrik dengan kreteria tamat SLTA untuk mengikuti Diklat calon tutor Aksara.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Informasi dari kepala kampung dan ditindak lanjuti oleh para tutor.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Minimal SLTA atau Sarjana.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Lima puluh orang.

10. BerapakahjumlahkeseluruhanpesertadidikpadaSanggarKegiatanBelajar KabupatenTelukWondama?
    Jawaban:
    Lima ratus orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:
    Belum memenuhi kreteria untuk memadai.

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Kantor Kep SKB, Sekretaris SKB, Staf, dan Pamong Belajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?

    Jawaban :
    Sudah, karena Sanggar Kegiatan Belajar bersentuhan langsung dengan masyarakat.

14. Apakah keberadaana Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengkuan dari Pemerintah?
    Jawaban:
    Sudah, Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 18 tahun 2016.

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
    Jawaban:
    Pada tahun 2010 SKB TW sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan dengan SK Bupati Teluk Wondama No 11 tahun 2010,Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan Nonformal SKB Rasiei Kab Teluk Wondama dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 18 Tahun 2016.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama? (*Mohon disertakan dengan SK Pengurus untuk dilampirkan dalam tesis*)
    Jawaban:
    Amos Wihiawari Ssos, dan Yudistira S Pd

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belaja Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Kep SKB Rasiei Kab TW URUSAN TATA USAHA SKB, Staf dan Pamong Belajar.

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
    Jawaban:
    Disesuaikan dengan keadaan di tempat warga belajar.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Tiap kelompok terdiri dari 10 orang warga belajar dibimbing oleh satu orang Tutor.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Agar warga terbebas dari Aksara.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumberdaya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belaja Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Yang utama adalah Sumber Daya Manusia. baik para Tutor maupun warga belajarnya.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Sangat akrap baik para tutor maupun dengan warga belajar.

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Sudah.

24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Sangat Positif

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Rata-rata emonomi menengah ke bawah.

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
    Jawaban:
    Banyak pada saat pelaksanaan mereka masih bekerja dan ada yang malu untuk belajar karena merasa sudah tua.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban:Belum

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Warga ikut dalam penyusunan jadwal belajar dan penyusunan bahan ajar.

29. Bagaimanakah partisipasi wargama syarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Sangat baik dan ada beberapa yang acuh.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Aparat desa beserta tokoh Agama sangat peduli terhadap program Keaksaraan.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Aparat Desa, Kampung dan Tokoh Agama sangat peduli dengan program Keaksaraan di distriknya.

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Setiap tahun, 1000 warga Teluk Wondama Bebas Aksara.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
Jawaban:
Adanya kelompak-kelompok keterampilan di tiap-tiap Kampung dan Taman Bacaan Masyarakat agar warga yang telah melek aksara, tidak buta aksara kembali.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.4

TRANSKRIPT WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 04
2. Nama Lengkap : **Juliana Mirino**
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Kristen Protestan
5. Tempat/Tanggal Lahir: Jayapura 19-09-1972
6. Pendidikan/Jurusan : S-1 / Ekonomi
7. Alamat Rumah : Pemda Manggurae
8. Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan
9. Pangkat/Golongan : Penata / III-d
10. Telp/Hp : 0821 9782 9077

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPT WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Program Aksara dengan KTSP harus dipadukan dengan muatan lokal di daerah tempat tinggal warga belajar.

2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Kurikulum apa saja yang akan digunakan agar warga aksara terbebas dari aksara.

3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Muatan kurikulumnya bersifat lokal.

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   Materi pelajarannya disesuaikan dengan mata pencahariannya saat ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban:
   Warga belajar telah terbebas dari Calistung.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Atas usulan dari kepala kampung atau kepala Distrik masing-masing.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Warga masyarakat calon tutor berpendidikan minimal SLTA.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Minimal SLTA.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Sebanyak 80 orang yang tersebar di 13 distrik dan 76 kampung.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Sebanyak 800 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:
    Belum, Kantor SKB wondama masih pinjam dan belum memiliki ruang belajar.

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    1 ruang Kep SKB rasiey; 1 Sekretaris SKB; 3 staf dan 4 pamong.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Rasiey?
Jawaban :
Keberadaan SKB sudah dikenal terutama di Distrik Rasiey.

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah? (*Mohon disertakan dengan SK atau bukti tertulis untuk dilampirkan dalam tesis*)
Jawaban:
Sudah.

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama! (*Mohon disertakan dengan data pendukung lainnya*)
Jawaban:
SKB TW Didirikan pada tahun 2011 dengan SK Bupati Teluk Wondama No. ..... pada tahun 2016 telah berubah dengan Perbup No. ....

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama? (*Mohon disertakan dengan SK Pengurus untuk dilampirkan dalam tesis*)
Jawaban:
Kepala SKB, Pamong Belajar dan tenaga Ahli yang diperbantukan dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Terlampir

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan baban pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:
Bahan ajar disesuaikau dengan potensi daerah Warga Aksara.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Tiap tutor manimal mengajar satu kelompok 10 orang warga Aksara.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Agar warga negara Indonesia terutama yang ada di Rasiey terbebes dari aksara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Sumber daya yang sangat di perlukan dalam program Aksara adalah Sumber Daya Manusia yang terampil.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Komunikasi berjlan dengan sangat baik antara SKB, Tutor dan Warga Belajar.

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sudah.

24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Sangat baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Rata-rata menengah ke bawah.

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
    Jawaban:
    Sebagian kecil yang mengatakan kalau kita sudah bebas Aksara nanti dapat apa.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
    Jawaban:
    Belum karena pamong belajar membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan tempat tinggal warga belajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    SKB bersama masyarakat merencanakan untuk adanya program Aksara di kampungnya masing-masing.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Sangat baik banyak yang mengikuti dengan antusias.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Warga masyarakat menanggapi dengan baik terutama aparat desanya.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Pengawasan dari distrik dan apatat kampung turut mengawasi jalannya program Aksara tersebut.

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Setiap tahunnya 1000 warga aksara sudah dapat CALISTUNG.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
    Jawaban:
    Mereka mendapatkan pembekalan berupa keterampilan-keterampilan praktis yang dapat menolong diri dan keluarganya kelak.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.5

TRANSKRIPTWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 05
2. Nama Lengkap : **Edy Waluyo**
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir: Ransiki, 21 Oktober 1959
6. Pendidikan/Jurusan : S-1
7. Alamat Rumah : Permu Pemda Manggurai
8. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dinas Sosial Teluk Wondama
9. Pangkat/Golongan : Pembina / IV.b
10. Telp/Hp : 082199761200

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPT WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran yang di padukan dengan kondisi dan situasi di lingkungan masing-masing warga belajar.

2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Bagainana cara mengajar agar warga terbebas dari Aksara.

3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   KTSP yang disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   KTSP dengan bahan ajar yang ada di sekitarnya.

5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban: Warga belajar telah terbebas dari Aksara (CALISTUNG).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Atas usulan dari masing-masing Distrik, dengan kreteria pendidikan tamat SLTA.Warga masyarakat tersebut mau mengabdi untuk tutor Aksara.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Informasi warga yang masih aksara dari kepala kampung yang ditindak lanjuti oleh tutor yang ada di desa tersebut.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Tingkat pendidikan tamat SMA sederajat.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: 80 orang.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Belum, masih banyak yang harus dibenahi.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sudah (foto terlampir).

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah? *Jawaban: Sudah. SK Bupati Teluk Wondama.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
Jawaban:
Sanggar Kegiatan Belajar Teluk wondama berdiri tahun 2011 sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Teluk Wondama. dengan SK Bupati TW Nomor 11 Tahun 2016 berubah menjadi satuan pendidikan Nonformal dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 18 tehun 2016.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Amos Wihiawari, S.Sos. dan Yudistia, S.Pd.

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
   I. *Kepala SKB*
   II. *Urusan Tata Usaha*
   III. *Kelompok Jabatan Fungsional (Pamong Belajar)*

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:
Materi pembelajaran disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Dari hasil kesepakatan antara warga belajar dan tutor Aksara.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Agar warga masyarakat Distrik Rasiey dapat terbebas dari aksara.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Yang sangat dibutuhkan adalah Sumber Daya Manusia, baik tutor maupun warga belajarnya. Sehingga berjalan dengan baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sangat baik.

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sudah sangat dikenal.

24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Sangat baik karena banyak warga yang membutuhkan bimbingan dan keterampilan.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Rata-rata ekonomi menengah ke bawah.

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban: Banyak yang merasa sudah tua jadi tidak perlu untuk belajar.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban:Belum, masih mengadopsi dari daerah terdekat.

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Sangat positif.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Masyaakat sangat senang dengan adanya program Aksara sehingga mereka ingin cepat terbebasa dari aksara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Warga masyarakat pada umumnya turut serta dalam menyusun jadwal dan bahan ajar hingga proses belajar. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Kontrol masyarakat sangat baik.

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Komitmen dari Sanggar Kebiatan Belajar dalam satu tahun lima ratus warga aksara dapat terbebas dari aksara.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
    Jawaban:
    Mereka di bekali dengan keterampilan-keterampilan yang nantinya dapat meningkatkan perekonomiannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.6

TRANSKRIPTnWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN TUNA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 06
2. Nama Lengkap : **Jonatan Sembiring**
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Kristen Protestan
5. Tempat/Tanggal Lahir: Sibirik-birik 10 Nov 1966
6. Pendidikan/Jurusan : S-1 / MIPA
7. Alamat Rumah : Komp SMA Wasior
8. Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kabid Pendidikan Non Formal
9. Pangkat/Golongan : Pembina IV a
10. Telp/Hp : 0813 4444 7977

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPT WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kahupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan menggunakan metode mengajar terstruktur, SAS (Struktur Analisis Sistem).

2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di tempat diselenggarakannya Aksara.

3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Muatan kurikulum lokal jadi contoh bahan ajarnya disesuaikan dengan lokasi warga beajar.

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   Gambar. Nama. Dibaca. Tulisannya. Binatang. Sapi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban: Dapat Baca Tulis Hitung.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Pendidikan SLTA atas usulan dari Kepala Distrik.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Warga yang masih buta aksara usia 15 samapai 59 tahun tidak pernah sekolah atau putus sekolah dan buta huruf kembali.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Minimal SLTA dan diberi pembekalan tentang cara mengajar untuk orang dewasa.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Yang telah mendapat pembekalan 80 orang.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum memadai masih dalam tahap pembenahan.

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Gedung kantor masih pinjam dan jumlah pamong masih kurang.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sudah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
Jawaban:
Sudah. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomer 18 tahun 2016. Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Menjadi satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rasiei Kabupaten Teluk Wondama.

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
Jawaban:
SKB TW Didirikan pada tahun 2011 dengan SK Bupati Teluk Wondama No 11 tahun 2011.Pd th 2016 beralih fungsi menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar 'RASIEI' Kabupaten Teluk Wondama.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Amos Wihiawari, S.Sos. dan Yudistira, S.Pd.

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
   I. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar
   II. Kepala Tata Usaha
   III. Kelompok Fungsional (Pamong Belajar)

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:
Materi yang akan diberikan disesuaikan dengan keadaan warga belajar.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Disepakati bersama antara warga belajar dengan tutor.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Agar warga masyarakat terbebas dari kebodohan dan dapat CALISTUNG.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Yang sangat di perlukan adalah Sumber Daya Manusia.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sangat baik.

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sudah.

24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Warga masyarakat menerima program aksara dengan baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Masyarakatnya rata-rata ekonomi menengah ke bawah.

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
    Jawaban:
    Bagi warga yang sudah berusia 40 th ke atas agak sulit untuk di ajak belajar karena malu dan ada pula yang merasa sudah tua jadi tidak usah belajar biar anak kami saja yang sekolah.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
    Jawaban:
    Belum semua mata pelajaran, sebagian masih adopsi dari kabupaten terdekat.

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Warga masyarakat turut dalam menyusun materi yang akan digunakan sebagai bahan ajar.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Warga sangat simpati terhadap aksara sehingga lebih aktif dalam belajar. Tapi ada juga yang menanggapi dengan acuh.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Ada yang senang ada yang hanya ikut dan ada pula yang acuh.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sangat baik terutama dari aparat kampung.

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Jika kita serius memberantas aksara maka di tahun 2020 masyarakat Rasiey bebas Aksara.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
Jawaban:
Mereka memperoleh keterampilan agar dapat menolong dirinya. Serta adanya taman bacaan di kampung agar mereka yang sudah melek aksara tidak kembali buta aksara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.7

TRANSKRIPTWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 07
2. Nama Lengkap :
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir: Makasar, 02 Februari 1976
6. Pendidikan/Jurusan : D 3 Pendidikan
7. Alamat Rumah : Untap Iriyati
8. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Dikmas PNF
9. Pangkat/Golongan : Penata / III.c
10. Telp/Hp :

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPTWAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Dipadukan dengan kondisi warga belajar.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Cara mengajarkan cara membaca.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Kurikulum disesuaikan dengan kemampuan warga belajar.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban: Dengan bahan ajar yang ada.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban: Diharapakan warga belajar terbebas dari buka aksara.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Diusulkan dari kepala kampung.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Direkrut yang berijazah SLTA.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: S-1 dan SLTA.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: 80 orang.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kahupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Belum, banyak yang tidak tersedia.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik
    Jawaban : Sudah.

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
    Jawaban: Ya.

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kahupaten Teluk Wondama! (*Mohon disertakan dengan data pendukung lainnya*)
    Jawaban:Didorong oleh masih banyaknya masyarakat yang buta aksara.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama
    Jawaban:
    Amos Wihawari dan Yudistira.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
I. KEPALA SFN SKB
II. URUSAN TATA USAHA
III. PAMONG BELAJAR

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban: Disesuaikan dengan potensi daerah.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Disesuaikan dengan kesepakatan warga belajar.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Menuntaskan buta aksara.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: SDM yang baik.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Baik.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sudah.
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Masih perlu dibantu.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban: Dana dari pemerintah dan medan.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban: Belum.

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Baik.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Baik.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Baik.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Belum begitu baik.

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Menuntaskan buta aksara sehingga tiap tahun bisa menurun.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
Jawaban: Bisa meningkatkan SDM dan pola pikir yang berubah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.8

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN TUNA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasResponden

1. Kode Responden	:	08
2. Nama Lengkap	:	**Dra.Hermin Sesa Rinding**
3. Jeniskelamin	:	Perempuan
4. Agama	:	Kristen Protestan
5. Tempat/Tanggal Lahir	:	Toraja, 23 September 1965
6. Pendidikan/Jurusan	:	S1
7. AlamatRumah	:	Perum Polris Teluk Wondama
8. Pekerjaan/Jabatan	:	Staf Ahli Bidang SDM
9. Pangkat/Golongan	:	Pembina / IV.a
10. Telp/Hp	:	0852 4436 7990

B. PetunjukPengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, September 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawabrumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Dijabarkan dengan keadaan daerah masing-masing.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Warga yang buta aksara menjadi melek aksara.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   KTSP dijabarkan dengan Cara Metode Analisa Struktur Sistem.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   KTSP dengan menggunakan Contoh benda yang ada di lokasi.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban: Baca, Tulis, dan Hitung.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Calon Tutor merupakan usulan dari tiap distrik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Kepala Distrik mengirim Calon tutor untuk mengikuti Diklat, usulan nama tutor adalah mereka yang minimal herijasa SLTA.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Minimal SLTA.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: 80 Orang.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban *: 500 Orang.*

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.

12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey? *Jawaban: Sudah.*

14. ApakahkeberadaanSanggarKegiatanBelajarKabupatenTelukWondamas udahmendapatpengakuandariPemerintah?
    Jawaban: Sudah.

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
    Jawaban: SKB Teluk Wondama Sk Bupati No. 18 tahun 2010 dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahaun 2016.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Amos Wihiawari,S.Sos dan Yudistira,S.Pd.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
I. KEPALA SATUAN PNF SKB
II. URUSAN TATA USAHA
III. KELOMOK JABATAN FUNGSIONAL (PAMONG BELAJAR)

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban: Disepakati agar Warga Belajar lebih Cepat mengerti.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Bahan pelajaran disesuaikan dengan situasi tempat Warga, Jadwal belajar, dan tempat belajar disepakati bersama.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Agar Warga rasiey terbebas dari Buta aksara.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
SDM yang akan dijadikan Tutor denga Sda yang akan dijadikan bahan ajar.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sangat Baik.

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sudah sangat dikenal.

24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Sangat baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Rata-rata menengah ke bawah.

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban:
Sulitnya mangajak agar warga belajar yang masih buta aksara mau mengikuti proses belajar mengajar.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban:
Belum masih mengadopsi dari daerah lain kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan warga aksara.

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di KabupatenTelukWondama?
Jawaban:
Masyarakat turut serta untuk merencanakan dan memberi masukan tentang apa yang akan menjadi bahan ajar.

29. Bagaimanakah partisipasi wargama syarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadapinformasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di DistrikR asiey?

Jawaban:
Sangat Baik karena masyarakat ingin agar warga yang masih buta aksara dapat cepat terbebas dari buta aksara.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Warga mau turut serta dalam mengambil keputusan sehingga proses belajar berlangsung dengan baik.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Baik pada saat pemberian materi warga masyarakat turut serta.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 1000 orang buta aksara dapat melek aksara.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas daria ksara?
    Jawaban:
    Mereka yang mengikuti proses belajar mangajar bisa memperoleh ketrampilan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.9

TRANSKRIPTWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN TUNA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 09
2. Nama Lengkap : **Rizel**
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Kristen Protestan
5. Tempat/Tanggal Lahir: Serui,12 Nopember 1976
6. Pendidikan/Jurusan : S-1 Bahasa Indonesia
7. Alamat Rumah : Untap Iriati III
8. Pekerjaan/Jabatan : Pamong Belajar
9. Pangkat/Golongan : Penata / III.c
10. Telp/Hp :

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPT WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan huta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Kurikulum disesuaikan dengan situasi di lingkungan masing-masing warga belajar.

2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Cara mengajar agar masyarakat terbebas dari aksara.

3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: KTSP disesuaikan dengan kondisi dimana warga belajar ada.

4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban: KTSP disesuaikan.

5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban: Warga belajar terbebas dari buta aksara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:Diusulkan dari kepala kampung setempat.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:Dengan informasi para masyarakat dan kepala kampung.

8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:SLTA sederajat.

9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:70 orang.

10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Baru gedung dan pamaong belajar, tutor.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey? *Jawaban:Sudah.*
14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah
    Jawaban: Sudah.
15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama! *Jawaban:*
    Dimulai dengan SKB dengan melihat jumlah buta aksara di masyarakat.
16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama*Jawaban:*
    Keta Himpauni dan Kelapa SKB.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Kepala PNF, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Fungsional.

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:
Disesuaikan dengan kemapuan tutor dan keadaan di sekitar warga belajar.

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Disesuaikan dengan waktu warga belajar.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Untuk meningkatkan pengetahuan warga belajar demi perbaikan ekonomi warga belajar di Rasiei.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: SDM

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sangat baik.

23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban: Sudah.

24. Bagaimanakah respon masyarakat kbususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Masih di bawah kehidupan standar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban:
Jarak dan waktu warga belajar tidak bertepatan dan sangat berjauhan.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban:
Ya, karena semua tutor keaksaraan sudah dilatih untuk menyusun program pembelajaran.

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Baik dan mendapat dukungan penuh.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:Sangat positif.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:Mendukung.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:Baik dan terorganisir.

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Menuntaskan buta aksara demi perbaikan ekonomi.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
Jawaban:
Dengan terbebasnya warga belajar dari buta aksara akan memberikan peluang untuk lebih rajin membaca dan mendapatkan informasi untuk mendukung perekonomian.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.10

TRANSKRIPTWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasInforman

1. Kode Informan : 10
2. Nama Lengkap : **Aleksander Yoteni**
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Kristen Protestan
5. Tempat/Tanggal Lahir: Rasieiy 23.oktober 1972
6. Pendidikan/Jurusan : D 3 Pendidikan
7. Alamat Rumah : Huntap Wondiboy
8. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Distrik Wondiboy
9. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I /III.d
10. Telp/Hp :

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIPT WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Ditetapkan bersama warga masyarakat dan warga belajar.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Warga belajar lebih mudah mengerti sehingga cepat terbebas dari aksara.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Bahan ajar diusahakan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga warga belajar lebih cepat menangkap seperti Kurikulm Tingkat Satuan Pelajaran.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban: Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran dengan metode melihat gambar lalu ada tulisan nama gambar tersebut.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban: Warga telah dapat baca Tulis Hitung yang sederhana.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:
Tiap Distrik mengirim calon tutor Aksara untuk mengikuti Diklat Pendidikan minimal SLTA.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Kepala kampung memberi informasi pada tutor yang ada di kampungnya untuk dididik agar warga yang buta aksara tersebut mau mengikuti Aksara.
8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Rata-rata SLTA.
9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: 80 orang.
10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 orang warga aksara.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum seluruhnya.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Belum, masih perlu perbaikan dan penambahan.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban :Sudah.
14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah
    Jawaban: Sudah.
15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama! *Jawaban:*
16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama
17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
    Jawaban:
    Disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga dan lingkungannya.
19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Teluk Wondama?
Jawaban:Waktu dan tempat belajar disepakati bersama.

20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasicy?
Jawaban: Agar mereka dapat membaca, menulis dan berhitung walau yang belum terlalu lancar.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:
Yang paling penting dalam mengajar aksara adalah sumber daya manusia yang akan menjadi tutor dan para warga aksara.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:Sangat baik.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
Jawaban :Sudah sangat dikenal.
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Sangat baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Rata-rata menengah ke bawah.
26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban:Banyak yang malu dan menganggap pendidikan itu tidak penting.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
Jawaban:Belum.
28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:
Masyarakat terutama kepala kampung dan para tokoh Agama turut serta dalam merencanakan program Aksara.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Warga terbagi ada yang menerima dengan antusias, ada yang malas, dan ada yang masa bodoh.
30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:Sangat senang dan aktif mengikuti.
31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:
Sangat baik sehingga jika ada yang malas belajar warga lain jemput di rumah.
32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Tahun 2025 seluruh warga Teluk Wondama Bebas Aksara.
33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
Jawaban:Mereka dibekali dengan keterampilan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.11

DAFTARPERTANYAANWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasResponden

1.	Kode Responden	: 11
2.	Nama Lengkap	: **Martinus Korwam**
3.	Jeniskelamin	: Laki - Laki
4.	Agama	: Kristen protestan
5.	Tempat/Tanggal Lahir	: Tandia, 11 September 1972
6.	Pendidikan/Jurusan	: SLTA
7.	AlamatRumah	: Jl Raya Tandia
8.	Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Forum Aksara
9.	Pangkat/Golongan	:
10.	Telp/Hp	:

B. PetunjukPengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kodeeti kpenelitian.
3. Ataskesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasiBapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terimakasih,

Teluk Wondama, September 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untu kmenjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga belajar.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: Kurikulum apa saja yang akan digunakan/cocok sehingga wagra belajar dapat terbebas dari calistung.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan warga belajar.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   Kurikulum Tingkat satuan pelajaran (KTSP) yang bahan ajarnya mudah didapatkan.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban: Mereka telah dapat menulis, membaca dan berhitung sedehana

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jawaban:
Melalui proses seleksi dan pengamatan kepala kampung dan kemudian diusulkan kepada Sanggar kegiatan belajar.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Dari hasil pengamatan Tutor dan informasi masyarakat.
8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Minimal SLTA.
9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: 80 Orang.
10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 Orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sudah.
14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
    Jawaban:Sudah.
15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
    Jawaban: Sudah.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama? (*Mohon disertakan dengan SK Pengurus untuk dilampirkan dalam tesis*)
    Jawaban:
    Karena Banykanya masyarakat yang buta aksara dan kurang kereatif.

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Kepala SKB , KTU dan Pamong Belajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
    Jawaban:
    1. Kepala SKB
    2. Kepala TataUsaha
    3. Kelompok Fungsional

19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Disepakati antara warga masyarat,tokah agama, dan tutor.
20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Jam, Hari disepakati antara Tutor dan Warga Belajar.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban : Agar warga masyakat Rasiei terbebas dari aksara

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyaraka tdanwarga belajar Program Keaksaraan di DistrikRasiey?
    Jawaban: SDM didukung oleh sumberdaya alam.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sangat baik.
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Sangat baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Rata-rata menengah ke bawah.
26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
    Jawaban:
    70% warga aksara yang berusia diatas 50 tahun sulit untuk diajak belajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
    Jawaban: Belum.
28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Warga masyarakat ikut dalam penyusunan bahan ajar.
29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di DistrikRasiey?
    Jawaban: Sangat baik.
30. Bagaimanakahpartisipasiwargamasyarakatdalampengambilankeputusa nterhadappelaksanaankebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban:Sangat positif.
31. Bagaimanakontrol/pengawasanmasyarakatterhadappelaksaankebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban:Sangat baik.
32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Warga belajar yang telah bebas aksara diberikan keterampilan praktis yang bahan bakunya mudah diperoleh di sekitar tempat tinggal warga belajar.

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah merek aterbebas dari aksara?
    Jawaban:
    Bisa hidup lebih baik karena sudah memiliki pengetahuan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran. 2.12

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN TUNA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasResponden

1.	KodeResponden	:	12
2.	Nama Lengkap	:	**Amos Wihawari, S.Sos.**
3.	Jeniskelamin	:	Laki - laki
4.	Agama	:	Kristen Protestan
5.	Tempat/TanggalLahir	:	Yapen 23 juni 1956
6.	Pendidikan/Jurusan	:	S1 / S.Sos
7.	AlamatRumah	:	HuntapWondiboy
8.	Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua HIMPAUDNI Kab TW
9.	Pangkat/Golongan	:	-
10.	Telp/Hp	:	0822 3867 4101

B. PetunjukPengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terimakasih,

Teluk Wondama, September 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan tuna aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah factordeterminan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten TelukW ondama?

.

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   KTSP dan Silabus yang telah disesuaikan dengan keadaan Warga Belajar.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Model apapun kurikulum dan metode yang berikan yang penting para warga cepat terbebas dari aksara.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:KTSP,KBK, SAS.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   KTSP yang pelaksanaannya di sesuaikan dengan keadaan warga belajar.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban:Dapat Baca,Tulis, Hitung secara sederhana.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Atas utusan dari tiap-tiap Distrik untuk mengikuti DIKLAT' tutor aksara.
7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Usulan dari kepala Desa dan hasil dari pengamatan totor aksara.
8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban: Rata-rata SLTA.
9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:80 orang.
10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:Belum.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:Kepala SKB, Sekretaris,Pamong Belajar, kantor, meja kursi.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sudah.
14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
    Jawaban: Sudah.
15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
    Jawaban:
    SKB TW berdiri th 201i sebagai UPTD Pendidikan. th 2016 berubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dengan perbup no18 tahun 2016.
16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Amos Wihiawari S Sos, Yudistira S.Pd

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Kep SKB Teluk Wondama. Sekretars, Pamong Belajar.

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:
Mengacu pada KTSP dengan memperhatikankondisi lingkungan kemudian disepakati bersama.
19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Disepakati antara tutor dan warga belajar.
20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban: Agar warga masyarakat dapat baca tulis hitung (CALISTUNG).

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Sumber Daya Manusia.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di DistrikRasiey?
Jawaban:Baik.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenalluas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey? *Jawaban: Sudah.*
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Sangat baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Menengah ke bawah.
26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban:
Warga yang berusia 50 tahun merasa sudah tua untuk apa belajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
    Jawaban: Belum.
28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Masyarakat terlibat dalam penyusunan program aksara di lingkungannya.
29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Ada yang menerima dengan baik ,ada yang acuh tak acuh dan ada yang menolak.
30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sangat baik.
31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban:Sangat baik.
32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Pada tahun 2025 warga masyarakat Teluk Wondama bebas AKSARA.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran. 2.13

DAFTARPERTANYAANWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasResponden

1. KodeResponden	:	13
2. Nama Lengkap	:	**Julius Carlos Indubri**
3. Jeniskelamin	:	Laki-laki
4. Agama	:	Kristen Protestan
5. Tempat/TanggalLahir	:	Rasiey 19 Mei 1952
6. Pendidikan/Jurusan	:	S1/ Bimbingan Konseling.
7. AlamatRumah	:	Kampung Torey
8. Pekerjaan/Jabatan	:	Pensiunan Guru
9. Pangkat/Golongan	:	-
10. Telp/Hp	:	-

B. PetunjukPengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, September 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama.
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Disepakati bersama tutor aksara,tokoh Agama, adat dan masyarakat.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Pengenalan benda secara nyata diimplementasikan kedalam tulisan sehingga warga belajar lebih cepat mengerti.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing warga belajar.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:
   KTSP yang pelaksanaannya menggunakan metode SAS.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban:
   Warga belajar lebih mandiri dalam mengerjakan tugas sehari-hari.

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Utusan dari tiap-tiap Distrik dengan pendidikan SLTA dan diberikan pelatihan tentang cara mengajar orang dewasa.

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Atas informasi dari kepala kampung dan hasil pengamatan tutor.
8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Rata-rata tamat SLTA ke atas.
9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:80 Orang.
10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:500 Orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:Belum.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban:Belum.

D. Karakteristik lembaga

13. ApakahkeberadaanSanggarKegiatanBelajarKabupatenTelukWondamas udahdikenalluasolehmasyarakatkhususnyadiDistrikRasiey?
    Jawaban:Sudah.
14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
    Jawaban: Sudah.
15. JelaskanriwayatsingkatkeberadaanSanggarKegiatanBelajarKabupatenT elukWondama!
    Jawaban:
    SKB TW berdiri tahun 2011 dengan SK Bupati TW ...Tahun 2016 menjadi satuan pendidikan nonformal dengan perbup TW
16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Amos Wihiawari S Sos (th 2010 sampai dengan th 2014)
    Yudistira SPd (th 2014 sampai sekarang)
17. BagaimanakahbentukStrukturOrganisasiSanggarKegiatanBelajarKabup atenTelukWondama?
    Jawaban:Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Kepala Tata Usaha Pamong Belajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
    Jawaban:
    Dengan mengacu pada KTSP disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing kelompok belajar aksara.
19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Dari hasil kesepakatan antara warga belajar dengan tutor.
20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Agar warga rasiey terbebas dari buta aksara.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Sumber daya manusia yang peduli dengan Aksara.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Baik.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?*Jawaban: Sudah.*
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Rata-rata menengah ke bawah.
26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
    Jawaban:
    Merasa diri sudah tua jadi tidak perlu untuk belajar, pada saat belajar tidak hadir dengan alasan mencari nafkah seperti berkebun,berburu,mengail dan sebagainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
    Jawaban:Belum.
28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di KabupatenTelukWondama?
    Jawaban :Sangat positif.
29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Beragam ada yang bersemangat dan ada yang acuh tak acuh.
30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:Sangat baik sehingga warga ikut dalam penyusunan bahan ajar.
31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sangat baik.
32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:1000 warga aksara telah dapat dituntaskan.
33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
    Jawaban:
    Setelah mereka dinyatakan bebas aksara, adanya tindak lanjut untuk menunjang kehidupannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.14

DAFTARPERTANYAANWAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. IdentitasResponden

1.	Kode Responden	: 14
	Nama Lengkap	: **Marthen Yoteni**
2.	Jeniskelamin	: Laki - laki
3.	Agama	: Kristen Protestan
4.	Tempat/Tanggal Lahir	: Rasiei 30 -12- 1956
5.	Pendidikan/Jurusan	: PGAK
6.	AlamatRumah	: Rasiei
7.	Pekerjaan/Jabatan	: Pensiunan PNS
8.	Pangkat/Golongan	: -
9.	Telp/Hp	: -

B. PetunjukPengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, Juli 2017

Peneliti,

Yudistsra

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal warga belajar.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:
   Pada prinsipnya kurikulum,metode dalam pendidikan keaksaraan tidak terikat yang penting warga belajar cepat tuntas.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran yang pelaksanaannya menggunakan metode Struktur Analisa Sistem.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:KTSP dengan menggunakan SAS.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban:
   Mereka dapat membaca menulis berhitung (sederhana).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Atas usulan dari tiap-tiap distrik minimal berijasah SLTA.
7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:
   Dari informasi kepala desa, warga masyarakat dan hasil pengamatan tutor.
8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:Minimal berijasah SLTA.
9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:80 Orang.
10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 500 Orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey? *Jawaban:Sudah.*

14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah? (*Jawaban: Sudah.*

15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama! *Jawaban:*
SKB TW Berdiri th 2011 sebagai UPTD dengab SK Bupati TW th 2016 SKB Berubah menjadi Satuan Pendidikan dengan Perbup.

16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama? *Amos Wihiawari S Sos th 2010 sampai th 2014.*
Yudistira SPd th 2014 sampai sekarang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Sekretaris , Pamong Belajar.

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
Jawaban:Disepakati bersama antara warga belajar,tokoh masyarakat dan tutor Aksara.
19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Dari hasil kesepakatan warga belajar dan tutor.
20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
Jawaban:Agar warga masyarakat rasiei terbebas dari aksara.

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban:Manusia baik tutor maupun warga aksara.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di DistrikRasiey?
Jawaban: Sangat baik.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas olehma syarakat khususnya diDistrik Rasiey? *Jawaban:Sudah.*
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
Jawaban: Rata-rata menengah ke bawah.
26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
Jawaban: Jam belajar yang telah disepakati tidak ditepati.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok matapelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
    Jawaban: Belum.
28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di KabupatenTelukWondama?
    Jawaban:
    Masyarakat turut dalam merencanakan dan pengawasan dalam program Aksara.
29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraandi DistrikRasiey?
    Jawaban: Sangat baik.
30. Bagaimanakahpartisipasiwargamasyarakatdalampengambilankeputusa nterhadappelaksanaankebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban: Baik, ada juga yang acuh tak acuh.
31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyaraka tterhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sangat baik.
32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: Tahun 2020 Teluk Wondama bebas aksara'

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
    Jawaban:
    Bagi yang telah bebas Aksara (CALISTUNG) dapat dibekali dengan keterampilan-keterampilan praktis.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2.15

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENUNTASKAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. Identitas Responden

1.	Kode Responden	: 15
2.	Nama Lengkap	: **Aser Sayori**
3.	Jenis kelamin	: Laki - laki
4.	Agama	: Kristen Protestan
5.	Tempat/Tanggal Lahir	: Ransiki,23 oktoner 1972
6.	Pendidikan/Jurusan	: SMA
7.	Alamat Rumah	: Huntap Isui
8.	Pekerjaan/Jabatan	: Warga Belajar Aksara
9.	Pangkat/Golongan	: -
10.	Telp/Hp	: 0812 4044 8219

B. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Sorong.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan akan dijamin keamanannya berdasarkan kode etik penelitian.
3. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) diucapkan banyak terima kasih,

Teluk Wondama, September 2017

Peneliti,

Yudistira

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan nonformal dalam pemberantasan buta aksara di Distrik Rasiey yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
2. Apakah faktor determinan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan buta aksara pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?

Daftar Pertanyaan:
(untuk masing-masing indikator berdasarkan kerangka pikir)

A. Kurikulum

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus pada pendidikan keaksaraan?
   Jawaban:Disepakati dengan Tutor, warga masyarakat dan warga belajar.
2. Apa saja prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan?
   Jawaban: KTSP yang dipadukan dengan metode Struktura Analisa System.
3. Apa saja muatan kurikulum pada pendidikan keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:KTSP,KBK dengan metode struktu Analisa Sistem.
4. Berikan contoh kurikulum yang digunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
   Jawaban:KTSP dengan menggunakan Tematik agar seluruh materi materi dapat diajarkan secara baik.
5. Apa saja yang menjadi dasar pencapaian kompetensi peserta Keaksaraan?
   Jawaban:Warga Belajar Telah bebas aksara (Calistung.)

B. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik

6. Bagaimanakah proses perekrutan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:Atas usulan dari tiap distrik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Bagaimanakah proses perekrutan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan kepala kampung.
8. Bagaimanakah tingkat pendidikan para pengelola dan pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:Minimal SLTA.
9. Berapakah jumlah keseluruhan tenaga pendidik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
   Jawaban:80 Orang.
10. Berapakah jumlah keseluruhan peserta didik pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban: 300 Orang.

C. Sarana dan Prasarana

11. Apakah kelengkapan sarana dan prasarana pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.
12. Apa saja kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah memadai?
    Jawaban: Belum.

D. Karakteristik lembaga

13. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban:Sudah.
14. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah?
    Jawaban:Sudah.
15. Jelaskan riwayat singkat keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama!
    Jawaban:
    Merupakan UPTD dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
16. Siapa saja yang pernah dan sedang menjadi Pengurus pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Amos Wihiawari S,Sos selaku ketua HIMPAUNI
    Yudistira sebagai Kepala SKB.
17. Bagaimanakah bentuk Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Kepala SKB....KTU....Kelomok Fungsional

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

E. Kejelasan standar dan tujuan

18. Bagaimana mekanisme penetapan bahan pembelajaran keaksaraan?
    Jawaban:Disusun dengan tutor tomas, toga dan Warga belajar.
19. Bagaimana pengaturan kegiatan pembelajaran pada kelompok belajar keaksaraan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Disepakti antara Tutor dan Warga Belajar.
20. Apakah tujuan diselenggarakannya Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:Agar warga masyarakat terbebas dari Calistung

F. Sumber daya yang diperlukan

21. Sumber daya apa saja yang diperlukan pada Program Keaksaraan di Distrik Rasiey oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Sumber daya manusia yang peduli dengan pendidikan non formal.

G. Komunikasi

22. Bagaimanakah komunikasi yang terjalin antara Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kahupaten Teluk Wondama dengan masyarakat dan warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban: Sangat baik.
23. Apakah keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Distrik Rasiey?
    Jawaban:Sudah.
24. Bagaimanakah respon masyarakat khususnya di Distrik Rasiey terhadap keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Sangat baik.

H. Kondisi sosial ekonomi

25. Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi warga belajar Program Keaksaraan di Distrik Rasiey pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:Rata-rata berada dibawahgaris kemiskinan.
26. Apa saja yang menjadi kendala dalam menuntaskan buta aksara di Kabupaten Teluk Wondama selain faktor sosial ekonomi?
    Jawaban:Tidak tepatnya waktu belajar dengan alasan kesibukan.

I. Kesediaan dan komitmen dari pelaksana

27. Apakah semua cakupan kelompok mata pelajaran program keaksaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama sudah dapat disusun dengan baik?
    Jawaban:Belum.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

28. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan Program Keaksaraan di Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Masyarakat turut serta dengan menyusun bahan ajar untuk aksara.

29. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraan di Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Hampir 80% warga menanggapi dengan baik.

30. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban:
    Sangat positif.

31. Bagaimana kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan Program Keaksaraandi Distrik Rasiey?
    Jawaban:Sangat baik.

32. Apa sajakah yang menjadi komitmen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Teluk Wondama?
    Jawaban:
    Mereka diberi ketrampilan yang bahan bakunya mudah diperoleh,

33. Apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Sdr(i) setelah mereka terbebas dari aksara?
    Jawaban:Diharapkan bisa lebih giat membaca dan berhitung.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DOKUMENTASI/FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN INFORMEN

WAWANCARA PLt KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA

WAWANCARA KABID PENDIDIKAN LUAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KAB. TELUK WONDAMA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

FOTO SAAT SELESAI WAWANCARA DENGAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN TELUK WONDAMA

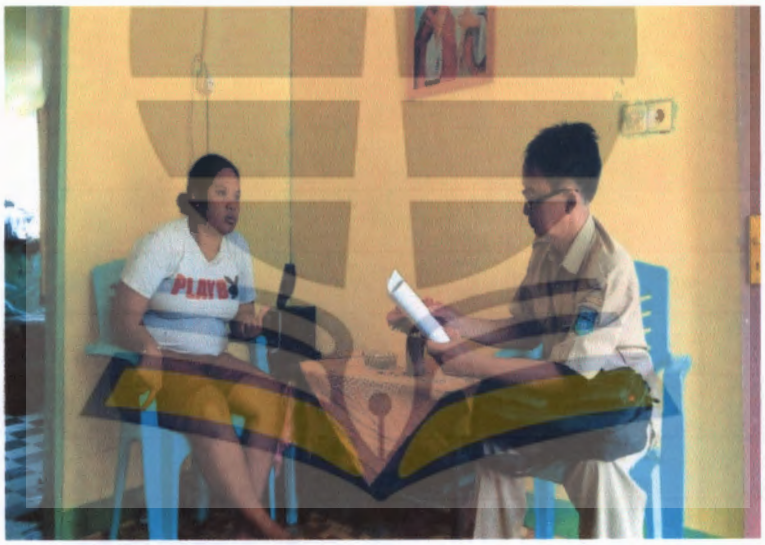

WAWANCARA DI RUMAH DENGAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN TELUK WONDAMA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPALA SEKSI DIKMAS PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUAPTEN TELUK WONDAMA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

WAWANCARA PAMONG BELAJAR PADA LINGKUP SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN TELUK WONDAMA

WAWANCARA KETUA HIMPAUDNI KABUPATEN TELUK WONDAMA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

WAWANCARA KE SALAH SATU PAMONG BELAJAR
DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

SALAH SATU KEGIATAN SKB DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

KEMENTERIAN RESET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Sorong
Jl. Jenderal Sudirman No.9a Remu Selatan, Sorong Papua Barat .
Telepon.0951 - 321054, Fak,0951 - 321107
E-mail: ut-Sorong@ut.ac.id

No : / UN31.61/LL/2017

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth :

Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olaraga
Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat
Di
Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian studi mahasiswa tersebut dibawah ini.

Nama	:	YUDISTIRA
NIM	:	500625352
Tahun Masuk	:	2016.1
Program	:	S2- ADMINSTRASI PUBLIK
Alamat	:	DEPAN YAPIS IRIATI DISTRIK WASIOR KAB.TELUK WONDAMA PAPUA BARAT

Mohon diberi Ijin untuk melaksanakan Penelitian Tugas Akhir Magister (TAPM)/Tesis dengan Judul ***:"Implementasi Kebijakan Pendidikan non Formal Dalam menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"***

Demikian permohonan kami,atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Sorong, 17 Februari 2017
Kepala UPBJJ-UT Sorong,

Yuli Tirtariandi El Anshori,SIP.M.AP
NIP. 19770711 200604 1 002

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43667.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLARAGA
Alamat : Kompleks Perkantoran Rasiei Kabupaten Teluk Wondama

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

No. 520/ 032 /SKMP-DPPO/ III/ 2017

Yang bertanda Tangan di bawah adalah :

Nama	:	Abraham Baibaba,S.Pd
N I P	:	19581230 198410 1 003
Jabatan	:	Kepala Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olaraga Kabupaten Teluk Wondama Prov.Papua Barat
Alamat	:	Jl. Poros Kaibi Distrik Wondiboi Kab.Teluk Wondama

Dengan ini menerangkan bahwa nama dibawah :

Nama	:	Yudistira
N I M	:	500625352
Status	:	Mahasiswa Pasca Sarjana UPBJJ-UT Sorong Provinsi Papua barat
Alamat	:	Depan Yapis Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama

Telah melaksanakan Penelitian yang bertempat/Lokasi pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar / Kantor Dinas Pendidikan dan Pemuda Olaraga sejak bbulan Maret sampai dengan bulan September 2017 dengan judul " ***Implementasi Kebijakan Pendidikan Non Formal Dalam Menuntaskan Tuna Aksara di Kabupaten Teluk Wondama"***

Demikian ***Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian*** ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Rasiei, 28 September 2017
KEPALA DINAS,

ABRAHAM BAIBABA,S.Pd
NIP. 1958101230 198410 1 003

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka